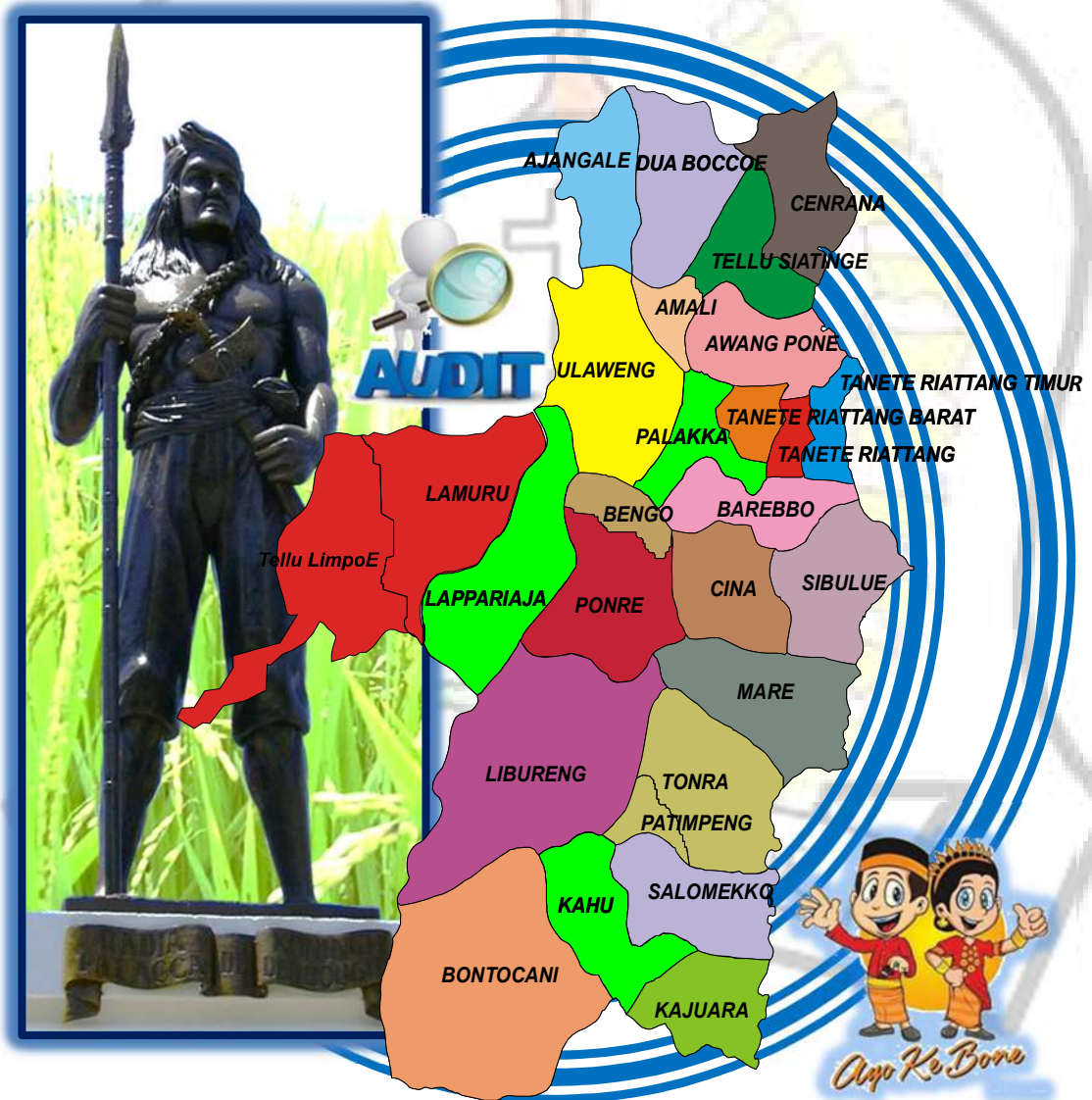




PEMERINTAH  
KABUPATEN BONE

# RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2021





**BUPATI BONE**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE**  
**NOMOR 28 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN BONE TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 yang terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta memberi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021, maka diperlukan Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);



15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Bone Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone tahun 2019 Nomor 55);
18. Peraturan Bupati Bone Nomor 28 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 28);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan,

- pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
6. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilhan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
  7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
  8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk priode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
  9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk priode 5 (lima) tahun.
  10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
  11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
  12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **Pasal 2**

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan selama 1 (satu) tahun, dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, dan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.



## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan maksud:

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2021;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021; dan
- c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021.

## **BAB III**

### **SISTEMATIKA PENULISAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan;  
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;  
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;  
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;  
Bab V : Penutup.

- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:

Lampiran I	: Dinas Pendidikan
Lampiran II	: Dinas Kesehatan
Lampiran III	: BLUD Rumah Sakit Umum Daerah
Lampiran IV	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Lampiran V	: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Lampiran VI	: Satuan Polisi Pamong Praja
Lampiran VII	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Lampiran VIII	: Dinas Pemadam Kebakaran
Lampiran IX	: Dinas Sosial
Lampiran X	: Dinas Ketenagakerjaan
Lampiran XI	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Lampiran XII	: Dinas Ketahanan Pangan
Lampiran XIII	: Dinas Lingkungan Hidup

Lampiran XIV	: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Lampiran XV	: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Lampiran XVI	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Lampiran XVII	: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Lampiran XVIII	: Dinas Perhubungan
Lampiran XIX	: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Lampiran XX	: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Lampiran XXI	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu
Lampiran XXII	: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Lampiran XXIII	: Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik
Lampiran XXIV	: Dinas Kebudayaan
Lampiran XXV	: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Lampiran XXVI	: Dinas Pariwisata
Lampiran XXVII	: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Lampiran XXVIII	: Dinas Peternakan
Lampiran XXIX	: Dinas Perindustrian
Lampiran XXX	: Dinas Perdagangan
Lampiran XXXI	: Dinas Kelautan dan Perikanan
Lampiran XXXII	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampiran XXXIII	: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Lampiran XXXIV	: Badan Pendapatan Daerah
Lampiran XXXV	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Lampiran XXXVI	: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Lampiran XXXVII	: Inspektorat Daerah
Lampiran XXXVIII	: Sekretariat DPRD
Lampiran XXXIX	: Sekretariat Daerah
Lampiran XL	: Kecamatan Lamuru
Lampiran XLI	: Kecamatan Dua Boccoe
Lampiran XLII	: Kecamatan Sibulue
Lampiran XLIII	: Kecamatan Barebbo
Lampiran XLIV	: Kecamatan Cina
Lampiran XLV	: Kecamatan Mare
Lampiran XLVI	: Kecamatan Awangpone
Lampiran XLVII	: Kecamatan Tellu Siattinge
Lampiran XLVIII	: Kecamatan Cenrana
Lampiran XLIX	: Kecamatan Ajangale
Lampiran L	: Kecamatan Amali



Lampiran LI	: Kecamatan Palakka
Lampiran LII	: Kecamatan Ulaweng
Lampiran LIII	: Kecamatan Bengo
Lampiran LIV	: Kecamatan Tellu Limpoe
Lampiran LV	: Kecamatan Lappariaja
Lampiran LVI	: Kecamatan Patimpeng
Lampiran LVII	: Kecamatan Ponre
Lampiran LVIII	: Kecamatan Libureng
Lampiran LIX	: Kecamatan Bontocani
Lampiran LX	: Kecamatan Kahu
Lampiran LXI	: Kecamatan Kajuara
Lampiran LXII	: Kecamatan Tonra
Lampiran LXIII	: Kecamatan Salomekko
Lampiran LXIV	: Kecamatan Tanete Riattang
Lampiran LXV	: Kecamatan Tanete Riattang Barat
Lampiran LXVI	: Kecamatan Tanete Riattang Timur

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam rangka menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2021, Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagai rujukan penyusunan program dan kegiatan.
- (2) Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### **Pasal 6**

Bappeda menelaah kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dengan RKPD Tahun 2021.

#### **Pasal 7**

Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV  
PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 21 Juli 2020

  
**BUPATI BONE,**  
  
**A. FAHSAR M. PADJALANGI**

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 21 Juli 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE**

  
**ANDI ISLAMUDDIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2020 NOMOR 28





## KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan amanah dari Bapak Bupati Bone dan seluruh masyarakat Kabupaten Bone, maka sudah menjadi kewajiban dan kebutuhan bagi Inspektorat Kabupaten Bone untuk menyusun perencanaan kinerjanya setiap tahun dalam bentuk dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai salah satu dokumen perencanaan kinerja dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik & bersih (*good governance & clean government*). Renja ini juga merupakan bentuk tanggung jawab formal Inspektorat Daerah Kab. Bone atas seluruh program & kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya guna memberikan arah bagi pencapaian sasaran strategis berdasarkan visi, misi, dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk lima tahun masa pemerintahan daerah.

Rencana Kerja Tahun 2021 ini memuat perencanaan strategi dan kebijakan pencapaian target kinerja Tahun 2021 berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap realisasi pencapaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan organisasi pada tahun sebelumnya, serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 beserta Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023.

Rencana Kinerja Tahunan ini mempunyai dua fungsi utama, yaitu :

**Pertama**, sebagai sarana bagi Inspektorat Daerah Kab. Bone untuk memenuhi kewajiban penyampaian Rencana Kinerja Tahunan kepada Bupati Bone.

**Kedua**, sebagai sarana pengukuran mandiri (*self measurement*) atas realisasi pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Bone dalam pelaksanaan tupoksi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Kabupaten Bone pada Tahun 2021 nanti.

Dengan adanya tuntutan peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan dari aspek perencanaan strategis, maka harus dilakukan penyelarasan terhadap dokumen perencanaan strategis, baik RKPD Kab. Bone dan Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bone. Hal ini dilaksanakan melalui penyelarasan pada rumusan tujuan, sasaran, serta indikator dan target kinerjanya termasuk pada Program dan Kegiatan Tahun 2021 dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 beserta Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023.



Perencanaan kinerja yang berbasis teknologi informasi (IT) kedepannya juga sudah menjadi tuntutan jaman yang harus dilakukan dan terus dikembangkan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis Teknologi Informasi (*e-government*), sehingga penyediaan sarana prasarana teknologi informasi yang memadai serta SDM yang kompeten, menjadi salah satu kunci utama keberhasilan perencanaan kinerja dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan ekonomis.

Selain itu, salah satu tantangan yang kedepannya perlu mendapat perhatian adalah pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam upaya penanganan kesehatan beserta pemulihan kehidupan ekonomi dan sosial kemasyarakatan dalam kondisi “*new normal*” setelah meluasnya pandemik wabah Virus COVID-19 yang masih berdampak hingga saat ini.

Dengan demikian, Kami berharap Rencana Kerja Tahun 2021 ini menjadi media perencanaan kinerja yang lebih bermanfaat sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah pada Tahun 2021 guna mendorong pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone yang lebih baik dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik & Bersih (Clean & Good Government) pada Pemerintahan Kabupaten Bone.

Watampone, Agustus 2020

PLT. INSPEKTUR DAERAH,



H. I L H A M, SE., M.Si.

Pangkat : Pembina

NIP. : 19700713 200502 1 002





DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR GAMBAR & TABEL .....	iv
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	4
1.3. Maksud dan Tujuan .....	6
1.4. Sistematika Penulisan .....	7
BAB II    HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah .....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah .....	16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah .....	23
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	26
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	33
BAB III    TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	34
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	34
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat Daerah .....	36
BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	41
4.1. Gambaran Umum Alokasi Anggaran Inspektorat Daerah .....	41
4.2. Program & Kegiatan dan Pendanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 .....	43
BAB V    PENUTUP .....	50
LAMPIRAN :	
1. Hasil Pemetaan Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Bone sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019	
2. Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 sesuai Hasil Pemetaan Berdasarkan PMDN Nomor 90 Tahun 2019	
3. Pemutakhiran Hasil Pemetaan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2021 Berdasarkan Pemutakhiran PMDN Nomor 90 Tahun 2019	



DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

	Halaman
Gambar 1 Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) .....	3
Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bone s/d Tahun 2020 .....	9
Tabel 2 Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018-2023 .....	16
Tabel 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Bone hingga Tahun 2020 dan Proyeksi Tahun 2021 dan 2022 .....	19
Tabel 4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kab. Bone Tahun 2021 - Inspektorat Daerah .....	27
Tabel 5 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah beserta Program dan Kegiatan Tahun 2021 – Inspektorat Daerah .....	39
Tabel 6 Alokasi Anggaran Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018-2020 Dan Proyeksi Tahun 2021 .....	41
Tabel 7 Rumusan Rencana Program & Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 - Inspektorat Daerah Kab. Bone .....	45





## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pemerintahan daerah pada hakekatnya merupakan sub sistem dari penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terintegrasi secara nasional untuk pencapaian tujuan dan cita-cita nasional Bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pencapaian tujuan dan cita-cita nasional bangsa dan negara Indonesia dijabarkan secara bertahap melalui perencanaan pembangunan nasional dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disinergikan oleh pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan di setiap daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah masing-masing, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan oleh pemerintah daerah berdasarkan urusan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan pembagian kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diwajibkan untuk memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik & Bersih (Good Governance & Clean Government), dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja (Perpres Nomor 29 Tahun 2014) dan Sistem Pengendalian Internal (PP No. 60 Tahun 2008) beserta Standar Pelayanan Minimal (PP No. 65 Tahun 2005), yang semuanya menjadi unsur yang tidak terpisahkan dalam implementasinya, dan juga sebagai wujud pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan (Perpres Nomor 81 Tahun 2010).

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang memuat tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan melalui penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Salah satu dokumen Rencana Perangkat Daerah yaitu Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun untuk periode 1 (satu) tahun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).



Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan kinerja tahunan perangkat daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah menurut urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan. Selain itu, dalam renja perangkat daerah disajikan pula kelompok sasaran, lokasi, serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dari setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dilakukan setiap tahunnya secara simultan dan selaras dengan penyusunan RKPD (yang diproses dengan pendekatan *teknokratik, partisipatif, politis, top-down dan bottom up*, dengan subansi pendekatan yang bersifat *holistik-tematik, integratif, dan spasial*).

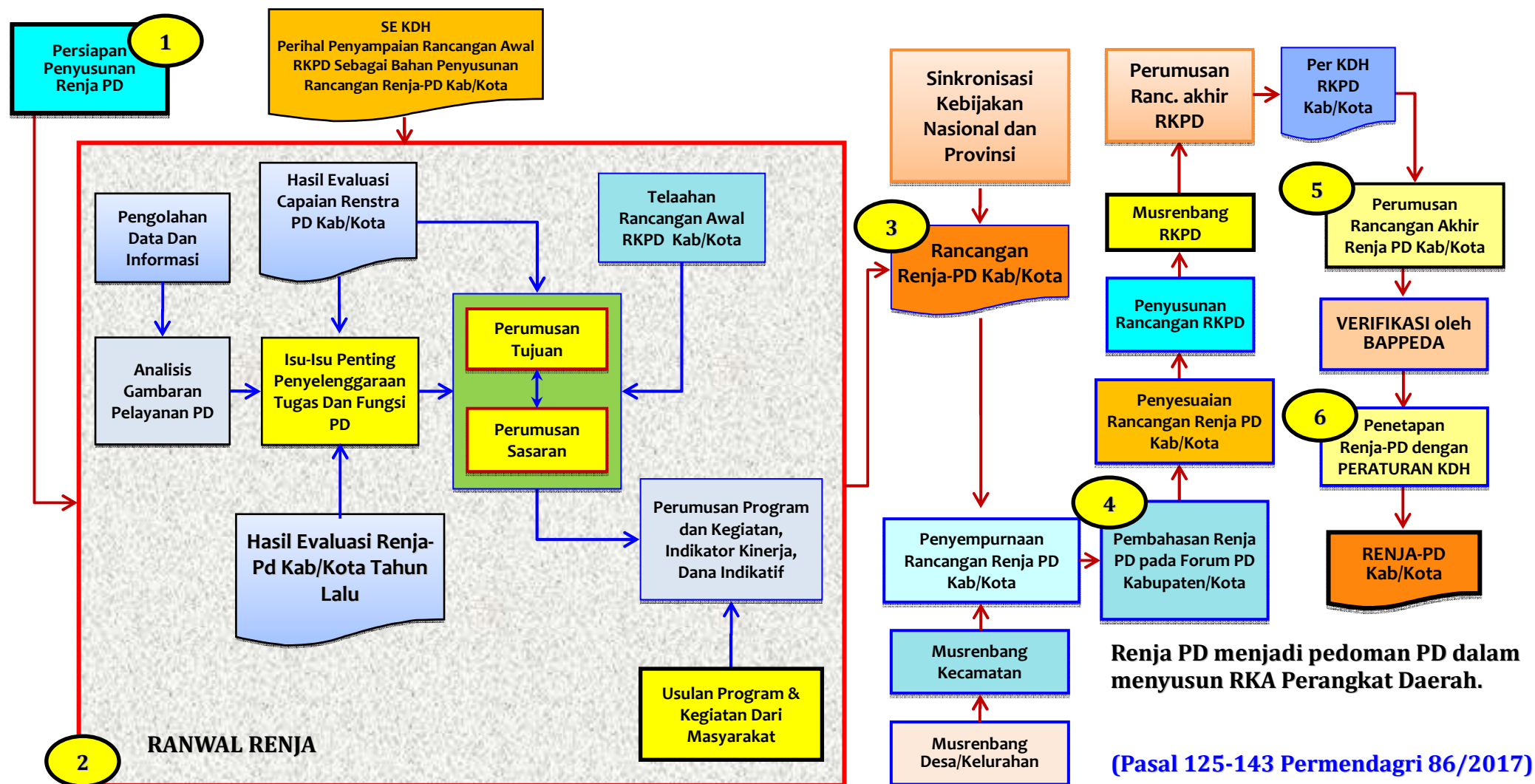
Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dimulai dari tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal yang kemudian menjadi rancangan Renja-PD. Selanjutnya, rancangan Renja ini disempurnakan melalui koordinasi dan sinergitas antar instansi pemerintah daerah dan partisipasi seluruh stakeholder yang terkait melalui suatu forum yang dinamakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang di tiap tingkatan pemerintahan mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten. Hasil Musrenbang tersebut kemudian ditindak lanjuti dalam perumusan rancangan akhir Renja-PD dalam Forum Perangkat Daerah yang terbagi menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah. Rancangan akhir Renja-PD merupakan hasil akhir dari seluruh tahapan penyusunan dengan memperhatikan keselarasan dan sinkronisasinya terhadap RKPD & RPJMD Kabupaten, Renstra Perangkat Daerah, RKPD Provinsi, dan Renja Perangkat Daerah Provinsi, Kementerian/Lembaga Pemerintah yang terkait.

Setelah melalui proses verifikasi oleh BAPPEDA dan finalisasi rancangan akhir, selanjutnya renja perangkat daerah ditetapkan melalui peraturan kepala daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan peraturan kepala daerah tentang RKPD. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), selanjutnya akan ditindaklanjuti sebagai pedoman untuk menetapkan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam proses penyusunan Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah (RKA dan APBD) setiap tahun anggaran.

Alur Penyusunan Renja Perangkat Daerah dalam proses perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 1. Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)





## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2021 ini, didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;



14. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Bone Tahun Anggaran 2020;
25. Peraturan Bupati Bone Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;
26. Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kab. Bone Tahun 2018-2023;
27. Peraturan Bupati Bone Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Bone Tahun Anggaran 2020;
28. Peraturan Bupati Bone Nomor 28 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Bone Tahun 2021.





### 1.3. Maksud dan Tujuan

Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah merupakan bagian penting dari proses manajemen pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih. Dan hal ini menjadi kewenangan dan tanggung jawab utama Inspektorat Daerah baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota untuk melaksanakan pembinaan & pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, termasuk penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka setiap tahunnya diperlukan perencanaan strategi dan kebijakan pencapaian target kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan organisasi yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kab. Bone selama 5 (lima) tahun.

Sebagai dokumen perencanaan kinerja tahunan, Rencana Kerja ini memuat strategi dan kebijakan beserta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone. Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kab. Bone dan diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Bone.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2021 ini disusun dengan **maksud** untuk menjabarkan RKPD Kabupaten Bone Tahun 2021 terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam pelaksanaan urusan pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkup Pemerintahan Kab. Bone selama lima tahun periode pemerintahan Bupati Bone terpilih.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2021 ini, adalah:

1. Untuk menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen penganggaran (RKA/DPA-SKPD) Inspektorat Daerah Kab. Bone pada Tahun 2021;
2. Untuk menetapkan indikator beserta target capaian kinerja beserta pagu indikatif program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Bone yang akan dilaksanakan pada tahun 2020;
3. Untuk menetapkan tolak ukur kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone pada Tahun 2021 sesuai dengan Renstra Periode Tahun 2018-2023.



#### **1.4. Sistematika Penyusunan**

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

**Bab 1 Pendahuluan ;** Memuat rumusan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

**Bab 2 Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu ;** Menyajikan uraian tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja pada tahun sebelumnya dan capaian kinerja berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan, isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, beserta review terhadap Rancangan Awal RKPD.

**Bab 3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah ;** Memuat rumusan tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran beserta Gambaran Umum Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan.

**Bab 4 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah ;** Menyajikan Gambaran Rencana Kerja Perangkat Daerah secara rinci tentang Program dan Kegiatan, Lokasi, Kelompok Sasaran beserta Pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan.

**Bab 5 Penutup ;** Menyajikan kesimpulan terkait catatan penting yang perlu menjadi perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut serta harapan atas Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Tahun Perencanaan.



## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Evaluasi terhadap capaian rencana kerja tahun lalu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pencapaian target kinerja sasaran strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kab. Bone pada tahun sebelumnya, untuk selanjutnya dinilai hasil capaian kinerjanya dan dipelajari hambatan dan kendala yang ada guna perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi pada tahun-tahun berikutnya. Proses evaluasi ini dilakukan terhadap capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja dan Perjanjian Kinerja antara Inspektur Kab. Bone dengan Bupati Bone selaku pemberi amanah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kab. Bone.

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah**

Kajian terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Tahun 2021 ini berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (2019) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2020), yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah Periode Tahun 2018-2023. Hal ini dilakukan dengan mengacu pada hasil laporan kinerja tahun 2019 Perangkat Daerah dan proyeksi capaian kinerja hingga Tahun 2020.

Hasil review terhadap realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja hingga tahun 2019 dan proyeksi capaian kinerja tahun 2020, selanjutnya menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021, dengan mempertimbangkan realisasi capaian program dan kegiatan, faktor-faktor penentu keberhasilan/kegagalannya serta implikasi yang timbul terhadap pencapaian target jangka menengah (Renstra). Dari hasil review tersebut, dapat ditetapkan kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk peningkatan/perbaikan kinerja Perangkat Daerah ke depannya.

Rekapitulasi hasil capaian kinerja dari pelaksanaan program/kegiatan sesuai Renja dan Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bone hingga tahun 2019 berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2019 dan proyeksi capaian kinerja hingga tahun 2020, secara umum hasil evaluasinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :





Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bone s/d Tahun 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020				
					Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)			
1		Urusan Wajib											
1	20	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian											
1	20	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran setiap tahun anggaran	100 %	100 %	100 %	99 %	99 %	100 %	99,50 %	99,50 %	
1	20	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Paket Penyediaan Jasa Komunikasi (telepon/faximile, internet, dan tv) sesuai rencana kebutuhan	180 Paket	36 Paket	36 Paket	36 Paket	100 %	36 Paket	72 Paket	40,00 %
1	20	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi/ Tenaga Teknis lainnya yang dibayarkan upah kerja beserta asuransinya untuk pelaksanaan administrasi perkantoran	69 Orang	12 Orang	12 Orang	11 Orang	91,7 %	13 Orang	24 Orang	34,78 %
1	20	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan sesuai rencana kebutuhan	20 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100 %	4 Paket	8 Paket	40,00 %
1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan	60 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100 %	12 Paket	24 Paket	40,00 %
1	20	01	23	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Dan Luar Daerah	Jumlah Keikutsertaan Aparat Inspektorat Daerah dalam kegiatan rutin pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	247 Kegiatan	47 Kegiatan	50 Kegiatan	50 Kegiatan	100 %	50 Kegiatan	100 Kegiatan	40,49 %
1	20	01	24	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK), Barang Cetak dan Penggandaan, serta Makanan & Minuman sesuai rencana kebutuhan	180 Paket	36 Paket	36 Paket	36 Paket	100 %	36 Paket	72 Paket	40,00 %
1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	100 %	100 %	100 %	97 %	97 %	100 %	98,50 %	98,50 %
1	20	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional sesuai rencana kebutuhan : - Mobil - Sepeda Motor	(22 Unit) - 10 Unit - 12 Unit	(3 Unit) - 1 Unit 2 Unit	(3 Unit) - 0 Unit - 3 Unit	(3 Unit) - 0 Unit - 3 Unit	100 %	(0 Unit) - 0 Unit - 0 Unit	(3 Unit) - 0 Unit - 3 Unit	13,64 %
1	20	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan : - TV - Sound System Ruang - Mic Wireless - Loudspeaker Mobile - AC - Pompa Air	(29 Unit/Set/Paket) - 2 Unit - 1 Set - 1 Set - 4 Unit - 5 Unit - 1 Unit	(4 Unit) - 1 Unit - 0 Set - 0 Set - 2 Unit - 0 Unit	(2 Set/Paket) - 0 Unit - 0 Set - 1 Set - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit	(2 Set/Paket) - 0 Unit - 0 Set - 1 Set - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit	100 %	(4 Unit) - 1 Unit - 0 Set - 0 Set - 1 Set - 0 Unit - 2 Unit - 0 Unit	(6 Unit/Set/Paket) - 1 Unit - 0 Set - 1 Set - 0 Unit - 2 Unit - 0 Unit	20,69 %



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcomes</i> ) / Kegiatan ( <i>Output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020				
					Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)			
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Vacuum Cleaner</li><li>- Tangga Lipat</li><li>- Gorden</li><li>- Karpet</li><li>- Penunjuk Waktu</li><li>- White Board</li><li>- Podium</li><li>- Papan Nama Kantor</li><li>- Papan Himbauan &amp; Informasi</li><li>- Dispenser</li><li>- Brankas Besi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 1 Unit</li><li>- 1 Unit</li><li>- 1 Paket</li><li>- 2 Paket</li><li>- 2 Unit</li><li>- 2 Unit</li><li>- 1 Unit</li><li>- 1 Unit</li><li>- 1 Unit</li><li>- 3 Unit</li><li>- 0 Unit</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Paket</li><li>- 0 Paket</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 1 Unit</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 1 Paket</li><li>- 0 Paket</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Paket</li><li>- 0 Paket</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 1 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 1 Paket</li><li>- 0 Paket</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 1 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li></ul>					
1	20	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan : <ul style="list-style-type: none"><li>- Komputer (PC Desktop)</li><li>- Notebook/Laptop</li><li>- Printer</li><li>- Scanner</li><li>- Proyektor</li><li>- Mesin Tik</li><li>- Kamera</li><li>- Monitor/Display</li><li>- CCTV (3 Titik)</li><li>- UPS/Stabilizer</li><li>- Alat Penghancur Kertas</li><li>- Alat Potong Kertas</li><li>- Meter Dorong</li><li>- Roll Meter</li><li>- Jangka Sorong</li><li>- Tabung Pemadam Kebakaran</li></ul>	(124 Unit/Paket) <ul style="list-style-type: none"><li>- 9 Unit</li><li>- 31 Unit</li><li>- 22 Unit</li><li>- 5 Unit</li><li>- 6 Unit</li><li>- 1 Unit</li><li>- 6 Unit</li><li>- 1 Unit</li><li>- 1 Paket</li><li>- 13 Unit</li><li>- 2 Unit</li><li>- 1 Unit</li><li>- 8 Unit</li><li>- 8 Unit</li><li>- 4 Unit</li><li>- 2 Unit</li></ul>	(24 Unit) <ul style="list-style-type: none"><li>- 4 Unit</li><li>- 3 Unit</li><li>- 3 Unit</li><li>- 1 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Paket</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 1 Unit</li><li>- 4 Unit</li><li>- 4 Unit</li><li>- 4 Unit</li><li>- 0 Unit</li></ul>	(18 Unit) <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 2 Unit</li><li>- 2 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Paket</li><li>- 0 Unit</li><li>- 1 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 4 Unit</li><li>- 4 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li></ul>	(14 Unit) <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 2 Unit</li><li>- 2 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Paket</li><li>- 0 Unit</li><li>- 1 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 4 Unit</li><li>- 4 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li></ul>	83 %	(30 Unit) <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 Unit</li><li>- 5 Unit</li><li>- 16 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 1 Unit</li><li>- 1 Paket</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 4 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 2 Unit</li></ul>	(44 Unit) <ul style="list-style-type: none"><li>- 2 Unit</li><li>- 5 Unit</li><li>- 18 Unit</li><li>- 2 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 1 Unit</li><li>- 1 Paket</li><li>- 0 Unit</li><li>- 1 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 8 Unit</li><li>- 4 Unit</li><li>- 0 Unit</li><li>- 2 Unit</li></ul>	35,48 %
1	20	02	10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Meubeleur sesuai rencana kebutuhan : <ul style="list-style-type: none"><li>- Meja Kerja</li><li>- Meja Rapat</li><li>- Kursi Kerja</li><li>- Kursi Rapat</li><li>- Kursi Tunggu</li><li>- Sofa</li><li>- Lemari Arsip</li><li>- Rak Buku</li><li>- Filling Kabinet</li></ul>	(189 Buah/Set) <ul style="list-style-type: none"><li>- 50 Buah</li><li>- 14 Buah</li><li>- 50 Buah</li><li>- 40 Buah</li><li>- 6 Buah</li><li>- 1 Buah</li><li>- 14 Buah</li><li>- 7 Buah</li><li>- 7 Buah</li></ul>	(5 Buah) <ul style="list-style-type: none"><li>- 0 Buah</li><li>- 0 Buah</li><li>- 0 Buah</li><li>- 0 Buah</li><li>- 0 Buah</li><li>- 0 Buah</li><li>- 5 Buah</li><li>- 0 Buah</li><li>- 0 Buah</li></ul>	(20 Buah) <ul style="list-style-type: none"><li>- 0 Buah</li><li>- 0 Buah</li><li>- 0 Buah</li><li>- 15 Buah</li><li>- 0 Buah</li><li>- 0 Buah</li><li>- 5 Buah</li><li>- 0 Buah</li><li>- 0 Buah</li></ul>	(20 Buah) <ul style="list-style-type: none"><li>- 0 Buah</li><li>- 0 Buah</li><li>- 0 Buah</li><li>- 15 Buah</li><li>- 0 Buah</li><li>- 0 Buah</li><li>- 5 Buah</li><li>- 0 Buah</li><li>- 0 Buah</li></ul>	100 %	(28 Buah) <ul style="list-style-type: none"><li>- 0 Buah</li><li>- 12 Buah</li><li>- 0 Buah</li><li>- 13 Buah</li><li>- 0 Buah</li><li>- 0 Buah</li><li>- 3 Buah</li><li>- 0 Buah</li><li>- 0 Buah</li></ul>	(48 Buah) <ul style="list-style-type: none"><li>- 0 Buah</li><li>- 12 Buah</li><li>- 0 Buah</li><li>- 28 Buah</li><li>- 0 Buah</li><li>- 0 Buah</li><li>- 8 Buah</li><li>- 0 Buah</li><li>- 0 Buah</li></ul>	58,33 %
1	20	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan/Perlengkapan Pemeliharaan Kebersihan dan Pekerjaan Perbaikan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	25 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	100 %	5 Paket	10 Paket	40,00 %
1	20	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan Dinas secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	20 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100 %	4 Paket	8 Paket	40,00 %
1	20	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Paket Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	100 Paket	4 Paket	20 Paket	20 Paket	100 %	20 Paket	40 Paket	40,00 %



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 20 02 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Paket Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	60 Paket	3 Paket	12 Paket	12 Paket	100 %	12 Paket	24 Paket	40,00 %
1 20 02 29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur Gedung Kantor	Jumlah Paket Pemeliharaan Meubeleur Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	60 Paket	3 Paket	12 Paket	12 Paket	100 %	12 Paket	24 Paket	40,00 %
1 20 03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Cakupan Realisasi Pengadaan Kebutuhan Penunjang Disiplin Aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1 20 03 05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu bagi Pegawai Inspektorat Daerah sesuai rencana kebutuhan	5 Paket	-	1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	2 Paket	40 %
1 20 06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &amp; Keuangan</b>	Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan setiap tahun anggaran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1 20 06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja Inspektorat Daerah yang tersusun	35 Dokumen	4 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %	7 Dokumen	14 Dokumen	40,00 %
1 20 06 02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Inspektorat Daerah yang tersusun	125 Dokumen	3 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	100 %	25 Dokumen	50 Dokumen	40,00 %
1 20 08	<b>Program Penunjang Pemerintahan Umum</b>	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum setiap tahun anggaran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1 20 08 01	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja dan Penganggaran Inspektorat Daerah yang tersusun	32 Dokumen	6 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %	6 Dokumen	13 Dokumen	40,63 %
1 20 08 02	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Website Perangkat Daerah	5 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	1 Kegiatan	2 Kegiatan	40,00 %
1 20 08 03	Promosi dan Pameran Pembangunan	Jumlah Kegiatan Promosi/Pameran Pembangunan yang diikuti	4 Kegiatan	-	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	25,00 %
1 20 20	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	Persentase OPD dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja minimal B (>60 - 70) berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	95 %	40 %	55 %	42,42 %	77,13 %	65 %	65 %	68,42 %
		Persentase OPD yang bersih dari temuan berdasarkan hasil audit pengelolaan keuangan dan aset daerah oleh BPK-RI	100 %	85 %	90 %	71,21 %	79,12 %	95 %	95 %	95,00 %
		Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Implementasi Reformasi Birokrasi	> 70 – 80	50	> 50 - 60	49,45	96,96 %	> 50 - 60	55	73,33 %
		Persentase OPD yang menerapkan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi)	90 %	35 %	50 %	0 %	0 %	60 %	60 %	66,67 %
		Jumlah OPD dan PemDes yang bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Dari Total 438 = 39 Badan/Dinas + 27 Kecamatan + 44 Kelurahan + 328 PemDes)	435 OPD/PemDes	350 OPD/PemDes	375 OPD/PemDes	434 OPD/PemDes	116 %	400 OPD/PemDes	417 OPD/PemDes	95,86 %





Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020				
					Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)			
			Persentase penyelesaian tindak lanjut terhadap rekomendasi temuan hasil pemeriksaan (hingga tahun berkenaan) : 1. BPK-RI 2. APIP (BPKP, Itprov, Itkab)	100 % 100 %	75 % 75 %	80 % 80 %	79,02 % 77,29 %	98,78 % 96,61 %	85 % 85 %	85 % 85 %	85,00 % 85,00 %		
			Persentase realisasi penanganan kasus pengaduan masyarakat yang diterima sesuai kewenangan Inspektorat Daerah pada tahun berkenaan	100 %	85 %	90 %	100 %	111 %	95 %	95 %	95,00 %		
			Persentase realisasi penanganan kasus kepegawaian sesuai kewenangan Inspektorat Daerah pada tahun berkenaan	100 %	85 %	90 %	95 %	106 %	95 %	95 %	95,00 %		
1	20	20	01	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pengawasan Internal (Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, Monev dan Kegiatan Pengawasan Lainnya) berdasarkan PKPT	20 Laporan (Per Triwulan)	4 Laporan Triwulan	4 Laporan Triwulan	100 %	4 Laporan Triwulan	8 Laporan Triwulan	40,00 %	
1	20	20	02	Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	20 Laporan (Per Triwulan)	4 Laporan Triwulan	4 Laporan Triwulan	100 %	4 Laporan Triwulan	8 Laporan Triwulan	40,00 %	
1	20	20	04	Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Kasus Kepegawaian sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	20 Laporan (Per Triwulan)	4 Laporan Triwulan	4 Laporan Triwulan	100 %	4 Laporan Triwulan	8 Laporan Triwulan	40,00 %	
1	20	20	05	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Jumlah Laporan Inventarisasi Data Temuan Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal secara periodik	20 Laporan (Per Triwulan)	4 Laporan Triwulan	4 Laporan Triwulan	100 %	4 Laporan Triwulan	8 Laporan Triwulan	40,00 %	
1	20	20	06	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah Laporan Data Hasil Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Internal & Eksternal secara periodik	20 Laporan (Per Triwulan)	4 Laporan Triwulan	4 Laporan Triwulan	100 %	4 Laporan Triwulan	8 Laporan Triwulan	20,00 %	
1	20	20	07	Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Jumlah Kegiatan Gelar Pengawasan Tingkat Kabupaten yang terlaksana	6 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	1 Kegiatan	2 Kegiatan	33,33 %	
1	20	20	14	Penanganan Laporan Gratifikasi, Whistle Blower System & Benturan Kepentingan	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Laporan Gratifikasi, Whistle Blower System dan Benturan Kepentingan	8 Laporan (Per Semester)	-	0 Laporan Semester	0 Laporan Semester	0 %	2 Laporan Semester	2 Laporan Semester	25,00 %
1	20	21		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase Jumlah Aparat Pengawas Inspektorat Daerah yang Bersertifikat keahlian sesuai kebutuhan hingga tahun berkenaan	90 %	45 %	50 %	48 %	86%	60 %	60 %	66,67 %
1	20	21	01	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	Jumlah Kegiatan Diklat/Bimtek Pembentukan/Penjenjangan Ahli dan Pengembangan Profesi yang diikuti oleh Aparat Pengawasan	108 Kegiatan	15 Kegiatan	18 Kegiatan	23 Kegiatan	128%	20 Kegiatan	43 Kegiatan	39,81 %



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 20 21 02	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) terkait pengawasan internal	12 PKS	2 PKS	2 PKS	1 PKS	50 %	2 PKS	3 PKS	25,00 %
1 20 22	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase Jumlah Elemen Penilaian (Assessment) Peningkatan Kapabilitas APIP yang mencapai Level 3 hingga tahun berkenaan	100 %	50 %	67 %	67 %	100 %	83 %	83 %	83,00 %
1 20 22 02	Penyusunan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan	Jumlah Kegiatan Penyusunan Dokumen Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP menuju Level 3	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	1 Kegiatan	2 Kegiatan	40,00 %

Keterangan : PD = Perangkat Daerah

*Realisasi Keuangan Tahun 2019 dan Tahun 2020 (Triwulan 2) - Inspektorat Daerah Kab. Bone*

JENIS BELANJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020 (Triwulan 2)		
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b> (Program dan Kegiatan)	<b>Rp. 6.203.054.601,-</b>	<b>Rp. 6.072.349.085,-</b>	<b>97,89 %</b>	<b>Rp. 8.228.065.251,-</b>	<b>Rp. 3.996.733.777,-</b>	<b>48,57 %</b>
<b>BELANJA LANGSUNG</b> (Program dan Kegiatan)	<b>Rp. 3.365.790.000,-</b>	<b>Rp. 3.094.447.562,-</b>	<b>91,94 %</b>	<b>Rp. 6.772.025.250,-</b>	<b>Rp. 1.968.317.669,-</b>	<b>29,07 %</b>
- Belanja Pegawai	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0,00 %	Rp. 67.500.000,-	Rp. 0,-	0,00 %
- Belanja Barang/Jasa	Rp. 3.213.540.000,-	Rp. 2.945.497.562,-	91,66 %	Rp. 6.440.025.250,-	Rp. 1.840.317.669,-	28,58 %
- Belanja Modal	Rp. 152.250.000,-	Rp. 148.950.000,-	97,83 %	Rp. 264.500.000,-	Rp. 128.000.000,-	48,39 %
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 9.568.844.601,-</b>	<b>Rp. 9.166.796.647,-</b>	<b>95,80 %</b>	<b>Rp. 15.000.090.501,-</b>	<b>Rp. 5.965.051.446,-</b>	<b>39,77 %</b>

Sumber Data : Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2019  
Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2020 (Triwulan 2-Januari s/d Juni 2020)

Sebagai penjelasan tambahan terkait tabel tersebut diatas, data kinerja untuk evaluasi pencapaian Renstra Periode tahun 2018-2023, dimulai dari tahun 2018 sebagai baseline data evaluasi capaian kinerja selama lima tahun selanjutnya. Namun demikian, data realisasi kinerja tahun 2018 tidak termasuk dalam akumulasi pengukuran capaian kinerja Renstra untuk periode Tahun 2018-2023, dimana akumulasi pengukurannya dimulai dari tahun 2019 sesuai periode perencanaan kinerja 5 tahunan.



Berdasarkan realisasi capaian hasil (outcome) program dan keluaran (output) kegiatan yang tersaji pada tabel 1 di atas, terlihat bahwa dari 15 indikator outcome dan 31 indikator output pada 8 program dan 31 Kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Bone, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Secara umum, sebagian besar indikator output kegiatan telah memenuhi target kinerja dengan nilai realisasi capaian kinerja 80-100% untuk tahun 2019.  
Namun, dari 31 indikator output tersebut, terdapat 2 (dua) kegiatan yang realisasi capaian indikator kinerjanya yang tidak mencapai target kinerja yang direncanakan ( $\leq 50\%$ ), yaitu kegiatan “*Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja*” dan “*Promosi dan Pameran Pembangunan*” yang secara tidak langsung juga mempengaruhi capaian outcome program terkait.
- b. Untuk capaian kinerja indikator outcome program pada tahun 2019, hanya 2 (dua) program prioritas yang masih perlu dioptimalkan pencapaiannya, karena masih terdapat indikator kinerjanya yang capaiannya masih dibawah 95%, bahkan masih ada yang berada pada angka realisasi 70-90%, yaitu Program “*Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH*” dan “*Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan*”, yang merupakan program strategis Inspektorat Daerah Kab. Bone. Hal ini mempengaruhi proyeksi capaian kinerja renstra hingga tahun berjalan (2020), sehingga perlu dievaluasi dan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah strategis untuk mengakselerasi pencapaiannya.
- c. Faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi capaian kinerja program dan kegiatan yang telah mencapai target yang direncanakan pada tahun 2019 adalah komitmen dan sinergitas seluruh pegawai Inspektorat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, disamping ketersediaan anggaran yang telah mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun-tahun sebelumnya.  
Sementara, beberapa program dan kegiatan yang belum dapat mencapai target yang diharapkan, dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal yang belum cukup memadai serta beban kerja dan wilayah kerja pengawasan yang begitu luas dengan waktu yang sangat padat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selakuk APIP bila dibandingkan dengan ketersediaan SDM yang ada. Selain itu, komitmen jajaran OPD yang masih kurang dalam menindaklanjuti hasil-hasil temuan pemeriksaan APIP maupun aparat pengawas eksternal.
- d. Untuk proyeksi capaian kinerja pada tahun berjalan (2020) sesuai dengan Renja dan Renstra Inspektorat Daerah Periode Tahun 2020, diperkirakan terdapat kegiatan yang tidak dapat dioptimalkan pencapaian target indikator kinerjanya.





Hal ini disebabkan oleh karena adanya penyesuaian anggaran untuk dialihkan ke anggaran penanganan wabah COVID-19 yang jadi pandemi di Indonesia sejak awal Maret 2020 serta pengamanan jaring sosial dan penguatan ekonomi masyarakat akibat dari pandemi ini.

Kondisi ini tentunya akan berdampak kepada pencapaian target kinerja outcome dari program-program yang telah ditetapkan pada tahun 2020, sehingga perlu ada kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam mengantisipasi hal ini, dengan tetap mengupayakan optimalisasi pencapaian target kinerja outcome program strategis yang ada.

- d. Kebijakan strategis dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan yang diperlukan untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja outcome/output dari program/kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan (Renja dan Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bone), khususnya program/kegiatan yang belum terpenuhi capaian kinerjanya, antara lain sebagai berikut :
  - > Penyesuaian target kinerja output kegiatan pada tahun 2020 yang disesuaikan dengan perubahan anggaran akibat adanya penyesuaian anggaran untuk penanganan wabah COVID-19, dengan tetap mengupayakan optimalisasi pencapaian target kinerja outcome program yang bersifat strategis.
  - > Perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pada tahun berikutnya dengan indikator outcome dan output serta target kinerja dengan prinsip “*money follow program*” yang berorientasi pada pencapaian hasil yang lebih efektif, efisien, ekonomis dan relevan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah sesuai dengan kondisi pandemi wabah COVID-19;
  - > Peningkatan kinerja organisasi yang difokuskan pada pencapaian target kinerja outcome/output dari program/kegiatan yang belum optimal pelaksanaannya, khususnya yang terkait dengan indikator sasaran strategis yang akan dicapai dari 3 program strategis Inspektorat Daerah Kab. Bone, yaitu ;
    - *Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.*
    - *Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.*
    - *Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.*
  - > Koordinasi dengan BPK, BPKP dan Inspektorat Provinsi Sul-Sel selaku mitra pengawasan, tetap harus dijaga dan ditingkatkan melalui konsultasi dan kerja sama pengawasan khususnya dalam kegiatan pemutakhiran data penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, peningkatan kapabilitas APIP, dan pengembangan kapasitas Aparatur Pengawasan;



- > Sosialisasi hasil pengawasan bagi OPD lingkup Pemerintah Kab. Bone melalui kegiatan Gelar Pengawasan tingkat Kabupaten perlu diarahkan pada upaya mendorong komitmen jajaran OPD untuk menindaklanjuti hasil temuan pengawasan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta penyelenggaraan Reformasi Birokrasi.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah Kab. Bone mempunyai tugas dan fungsi dalam hal Pembinaan dan Pengawasan Internal atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bone sebagaimana diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2016, Permendagri Nomor 107 Tahun 2017, Perda Kab. Bone Nomor 08 Tahun 2016, dan Peraturan Bupati Bone Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat.

Inspektorat Daerah Kab. Bone tidak memiliki indikator kinerja beserta target dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang diatur secara khusus dalam Peraturan Perundang-undangan yang ada. Namun demikian, kinerja pelayanan Inspektorat Daerah untuk lima tahun ini tetaplah penting dan harus mampu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, termasuk mendorong terwujudnya target-target kinerja pemerintahan daerah dalam setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan Visi dan Misi Bupati terpilih Tahun 2018-2023.

Dengan mengacu pada RPJMD Kab. Bone tahun 2018-2023, indikator kinerja pelayanan Inspektorat Daerah telah dituangkan dalam Renstra Inspektorat Kab. Bone Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019, dimana capaian kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone dinyatakan dalam 8 (delapan) sasaran strategis dengan 9 (sembilan) indikator kinerja.

Kesembilan indikator kinerja dari delapan sasaran strategis tersebut dinyatakan sebagai Indikator Kinerja yang menjadi dasar dalam pengukuran dan penilaian capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Bone, dengan tolok ukur kinerja sebagai berikut :

Tabel 2. Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018-2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SUMBER DATA
1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	Predikat (dengan Nilai)	<u>Penjelasan Target</u> : Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP yang dipublikasikan oleh Kementerian PAN-RB <u>Sumber Data</u> : Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Implementasi SAKIP Pemkab. Bone oleh Kementerian PAN-RB pada Tahun 2018-2023



SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SUMBER DATA
2. Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah	2. Opini BPK-RI berdasarkan Hasil Audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Status	<u>Penjelasan Target</u> : Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan Opini BPK-RI sesuai dengan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) <u>Sumber Data</u> : Laporan Hasil Audit (LHA) BPK-RI terhadap LKPD Kab. Bone pada Tahun 2018-2023
3. Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	3. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	Indeks (dengan Nilai)	<u>Penjelasan Target</u> : Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan Hasil Validasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi yang dilaporkan oleh Inspektorat Daerah secara online melalui Aplikasi Kementerian PAN-RB <u>Sumber Data</u> : Hasil Validasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Pemkab. Bone oleh Kementerian PAN-RB pada Tahun 2018-2023
4. Meningkatnya Kepatuhan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa atas Peraturan Perundang-undangan dalam Pengendalian Internal & Pencegahan KKN	4. Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Predikat (dengan Level)	<u>Penjelasan Target</u> : Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP oleh BPKP <u>Sumber Data</u> : Laporan Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIPPemkab. Bone oleh BPKP pada Tahun 2018-2023
	5. Persentase OPD dan Pemerintah Desa yang Bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN)	Persen (%)	<u>Formulasi Penghitungan</u> : (Perbandingan antara Jumlah OPD+ PemDes yang Bersih dari Temuan KKN dengan Jumlah Total OPD+PemDes) dikali 100 % <u>Sumber Data</u> : Diolah dari Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap OPD dan PemDes, baik oleh APIP, BPK-RI dan APH pada Tahun 2018-2023
5. Meningkatnya Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	6. Persentase kasus pengaduan masyarakat yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	Persen (%)	<u>Formulasi Penghitungan</u> : (Perbandingan antara Jumlah Laporan Hasil Penanganan/Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dengan Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat) dikali 100 % <u>Sumber Data</u> : Data Laporan Ikhtisar Hasil Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat sesuai kewenangan Inspektorat Daerah Kab. Bone berdasarkan penugasan Bupati Bone pada Tahun 2018-2023
6. Meningkatnya Kinerja Penanganan Kasus Kepegawaian dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	7. Persentase kasus kepegawaian yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	Persen (%)	<u>Formulasi Penghitungan</u> : (Perbandingan antara Jumlah Laporan Hasil Penanganan/Penyelesaian Kasus Kepegawaian dengan Jumlah Laporan Kasus Kepegawaian) dikali 100 % <u>Sumber Data</u> : Data Laporan Ikhtisar Hasil Penanganan Kasus Kepegawaian sesuai kewenangan Inspektorat Daerah Kab. Bone berdasarkan penugasan Bupati Bone pada Tahun 2018-2023





SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SUMBER DATA
7. Meningkatnya Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penjaminan Mutu (Quality Assurance) dan Jasa Konsultasi (Consulting Advisory) bagi Kinerja Pemda	8. Persentase ketersediaan Pejabat Fungsional Pengawasan yang ber sertifikat ahli berdasarkan analisa kebutuhan SDM APIP	Persen (%)	<u>Formulasi Penghitungan</u> : (Perbandingan antara Jumlah Pejabat Fungsional Pengawasan yang bersertifikat ahli dengan Jumlah Kebutuhan Aparatur Pengawasan) dikali 100 % <u>Sumber Data</u> : Data Kepegawaian dan Dokumen Analisis Kebutuhan Aparatur Inspektorat Daerah Kab. Bone
8. Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	9. Hasil Assessment Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah berdasarkan Standar IACM (Internal Audit Capability Model)	Persen (%)	<u>Penjelasan Target</u> : Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan Hasil Penilaian Kapabilitas (Quality Assurance) APIP oleh BPKP <u>Sumber Data</u> : Laporan Hasil Hasil Penilaian Kapabilitas (Quality Assurance) APIP-Inspektorat Daerah Kab. Bone oleh BPKP pada Tahun 2018-2023

Sumber : Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018-2023

Dari kesembilan indikator kinerja tersebut, indikator no. 1 s.d. 6 merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kab. Bone untuk Tahun 2018-2023. Pencapaian target kinerja dari keenam IKU tersebut merupakan gambaran utama kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Namun demikian, ketiga indikator kinerja lainnya tetaplah penting untuk menunjang pencapaian kinerja keenam IKU tersebut.

Hasil pengukuran capaian kinerja dan analisisnya berdasarkan indikator kinerja dari sasaran strategis tersebut di atas sebagai gambaran pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone hingga Tahun 2020 untuk pencapaian target jangka menengah sesuai Renstra Tahun 2018-2023, disajikan dalam tabel berikut ini :



Tabel 3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Bone hingga Tahun 2020 dan Proyeksi Tahun 2021 dan 2022

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b>											
01	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	Minimal B (>60-70)	Minimal B (>60-70)	CC (>50-60)	B (>60-70)	BB (>70-80)	BB (>70-80)	B (60,03)	- (Belum ada evaluasi oleh KemenPAN-RB)	BB (>60-70)	BB (>70-80)
<p><b>Catatan Analisis :</b> Untuk Tahun 2020, belum ada evaluasi oleh KemenPAN-RB terhadap implementasi SAKIP PemKab. Bone, dan diperkirakan akan terlaksana pada bulan Agustus-September 2019.</p> <p>Berdasarkan LHE KemenPAN-RB pada tahun 2019, tingkat akuntabilitas kinerja PemKab. Bone telah mencapai predikat B (Nilai 60,03). Capaian kinerja indikator ini sudah memenuhi target minimal dan melebihi target kinerja tahun 2019. Namun demikian, nilai akuntabilitasnya masih tergolong rendah dari standar nilai tertinggi untuk kategori B (Baik), dan masih perlu dioptimalkan untuk pencapaian target akhir jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra dan RPJMD Kab. Bone, yaitu predikat A (&gt;80-90).</p> <p>Kondisi ini pada dasarnya dipengaruhi oleh adanya upaya perbaikan dalam proses perencanaan kinerja, namun belum cukup memadai dalam proses implementasi SAKIP diseluruh tahapan kinerja. Dan kelemahan ini telah diidentifikasi oleh PemKab. Bone dan sementara dalam proses peningkatan kualitas implementasi SAKIP melalui monev kinerja secara berkala baik di internal OPD maupun oleh APIP.</p> <p>Kedepannya, upaya peningkatan kualitas implementasi SAKIP dimulai dari RPJMD dan Renstra PD sebagai acuan utama, akan ditindaklanjuti dengan implementasi IT berupa aplikasi online, yang dapat mendorong implementasi SAKIP yang lebih baik, selaras dan konsisten dalam setiap tahapannya agar tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Kab. Bone menjadi lebih baik hingga dapat mencapai target kinerja yang direncanakan pada akhir Periode RPJMD 2018-2023.</p> <p>Tentunya, peran Inspektorat Daerah Kab. Bone sangat penting dalam mewujudkan hal ini, melalui kegiatan evaluasi implementasi SAKIP pada seluruh OPD lingkup Pemerintah Kab. Bone.</p> <p>Dan untuk pelaksanaannya, juga diperlukan peningkatan kompetensi aparat pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam melakukan evaluasi implementasi SAKIP, agar perannya selaku Penjamin Mutu (Quality Assurance), maupun Pemberi Jasa Konsultasi dalam hal ini, bisa lebih optimal dan berkelanjutan, hingga target capaian kinerja sasaran ini dapat tercapai.</p>											
<b>Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah</b>											
02	Opini BPK-RI berdasarkan Hasil Audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (LKPD T.A. 2018)	WTP (LKPD T.A. 2019)	WTP (LKPD T.A. 2020)	WTP (LKPD T.A. 2021)	WTP (LKPD T.A. 2018)	WTP (LKPD T.A. 2019)	WTP (LKPD T.A. 2020)	WTP (LKPD T.A. 2021)
<p>(Secara bertahap ditargetkan ada peningkatan kualitas LKPD di setiap tahunnya hingga jumlah temuan SPI &amp; Kepatuhan Perundang-undangan dapat diminimalisir secara signifikan hingga akhir periode Renstra/RPJMD tahun 2018-2023)</p> <p>(masih terdapat temuan SPI &amp; Kepatuhan Perundang-undangan)</p> <p>(masih terdapat temuan SPI &amp; Kepatuhan Perundang-undangan)</p> <p><b>Catatan Analisis :</b> Hingga Tahun 2020, berdasarkan hasil audit BPK (yang diperoleh pada Bulan Mei 2020) terhadap LKPD Kab. Bone T.A. 2019, telah mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian kinerja indikator ini telah sesuai target Renja untuk tahun 2020, dan juga telah memenuhi pencapaian target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra dan RPJMD Kab. Bone untuk Tahun 2018-2023. Namun demikian, dalam Laporan Hasil Audit (LHA) BPK-RI, masih terdapat beberapa catatan kelemahan berupa temuan/rekomendasi yang terkait dengan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan masih diperlukan peningkatan kualitas LKPD Pemerintah Kab. Bone agar lebih akuntabel dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Kedepannya, masih diperlukan upaya perbaikan pengelolaan keuangan dan aset daerah disertai dengan pembinaan dan pengawasan internal yang berkelanjutan dari aparat pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang lebih memadai dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk mempertahankan akuntabilitas LKPD Kab. Bone dengan Opini WTP dari BPK-RI dengan kualitas yang lebih baik pada tahun-tahun berikutnya.</p> <p>Hal-hal yang menjadi kelemahan dalam LKPD PemKab. Bone, selanjutnya harus menjadi prioritas dalam aspek pembinaan dan pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah Kab. Bone, melalui perencanaan pengawasan yang berbasis resiko.</p>											



NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>Sasaran 3 : Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah</b>											
03	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	Minimal B (>60-70)	Minimal B (>60-70)	CC (>50-60)	CC (>50-60)	B (>60-70)	B (>60-70)	C (36,72)	- (Belum ada penilaian oleh KemenPANRB)	CC (>50-60)	B (>60-70)
<b>Catatan Analisis :</b> Nilai indeks reformasi birokrasi masih berada pada kategori predikat C (cukup) dengan nilai 36,72 berdasarkan Hasil penilaian terakhir pada tahun 2018 (Tidak ada hasil penilaian tahun 2019). Sejalan dengan masih rendahnya tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Kab. Bone hingga tahun 2019, realisasi capaian kinerja untuk indikator sasaran ini masih cukup jauh dari target kinerja minimal yang harus dicapai berdasarkan target jangka menengah yang ditetapkan dalam RPJMD Kab. Bone dan Renstra Inspektorat Daerah periode Tahun 2018-2023, yaitu minimal predikat B. Pada tahun 2020, pelaksanaan validasi oleh KemenPAN-RB atas penilaian mandiri RB dijadwalkan dapat terlaksana pada Triwulan III tahun 2020. Komitmen dan konsistensi jajaran Pemerintah Kab. Bone untuk penguatan implementasi Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi 8 Area Perubahan, menjadi kunci utama untuk mewujudkan hal ini. Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam perannya selaku penjamin mutu, dituntut untuk mampu mendorong terwujudnya target sasaran ini, melalui kegiatan monitoring dan evaluasi penilaian secara mandiri atas implementasi Reformasi Birokrasi yang selanjutnya hasilnya dilaporkan secara online kepada KemenPAN-RB, untuk memperoleh validasi akhir penilaiannya.											
<b>Sasaran 4 : Meningkatkan Kepatuhan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa atas Peraturan Perundang-undangan dalam Pengendalian Internal &amp; Pencegahan KKN</b>											
04	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Minimal Level 3 (Terdefinisi)	Minimal Level 3 (Terdefinisi)	Level 2 (Berkembang)	Level 2 (Berkembang)	Level 2 (Berkembang)	Level 3 (Terdefinisi)	Level 1 (Rintisan) Nilai 1,92	- (Belum ada penilaian dari BPKP)	Level 2 (Berkembang)	Level 3 (Terdefinisi)
<b>Catatan Analisis :</b> Hingga tahun 2019, tingkat maturitas SPIP Pemerintah Kab. Bone, masih berada pada Level 1 (rintisan) dengan nilai 1,92 berdasarkan hasil penilaian terakhir oleh BPKP. Nilai ini menunjukkan masih rendahnya penerapan SPIP dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Kab. Bone. Sejalan dengan masih rendahnya tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Kab. Bone hingga tahun 2019, realisasi capaian kinerja untuk indikator sasaran ini masih cukup jauh dari target kinerja minimal yang harus dicapai berdasarkan target jangka menengah yang ditetapkan dalam RPJMD Kab. Bone dan Renstra Inspektorat Daerah periode Tahun 2018-2023, yaitu minimal Level 3 (terdefinisi). Untuk tahun 2020, belum ada penilaian oleh BPKP, dan ini dijadwalkan dapat terlaksana pada Triwulan III atau IV tahun 2020. Komitmen dan konsistensi jajaran Pemerintah Kab. Bone untuk penguatan implementasi SPIP dalam manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam setiap jenjang manajemen pemerintahan, menjadi kunci utama untuk mewujudkan hal ini. Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam perannya selaku penjamin mutu, dituntut untuk mampu mendorong terwujudnya target sasaran ini, melalui kegiatan monitoring dan evaluasi maturitas SPIP ditingkat OPD, yang selanjutnya diharapkan dapat mendorong peningkatan maturitas SPIP Pemkab. Bone menjadi lebih baik, sebelum dinilai oleh BPKP.											
05	Persentase OPD dan PemDes yang Bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN)	-	-	85 %	90 %	95 %	98 %	99,77 %	- (Data Capaian Kinerja hanya dapat diperoleh pada akhir tahun berjalan)	96 %	98 %
<b>Catatan Analisis :</b> Hingga tahun 2019, realisasi capaian kinerja ini berada pada persentase 99% dilihat dari total jumlah 438 OPD dan Pemerintah Desa yang meliputi 39 Badan/Dinas + 27 Kecamatan + 44 Kelurahan + 328 PemDes dalam lingkup Pemerintah Kab. Bone. Namun hal ini, lebih dipengaruhi oleh kasus-kasus terkait KKN, masih berproses di APH sehingga belum final status hukumnya. Pemerintah Desa merupakan instansi penyelenggaraan pemerintahan yang didalamnya masih cukup banyak ditemukan temuan KKN yang material dan dilaporkan oleh masyarakat, bahkan, beberapa Kepala Desa telah dinyatakan terbukti bersalah dengan penyalahgunaan kewenangannya dalam pengelolaan keuangan desa oleh APH. Untuk tahun 2020, data terbaru terkait sasaran ini, masih dalam proses, dan hanya dapat diperoleh pada akhir tahun, setelah proses pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah terhadap pemerintah desa terlaksana, yang akan disinkronisasikan datanya dengan hasil pemeriksaan oleh APH. Selain itu, Pembinaan dan Pengawasan terhadap Dana Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, menjadi salah satu prioritas pengawasan yang dibebankan kepada Inspektorat Daerah agar penyimpangannya dapat diminimalisir seoptimal mungkin. Regulasi terkait pengawasan dana desa ini terus mengalami dinamika, dan hal ini menjadi tantangan bagi aparat pengawasan Inspektorat Daerah untuk terus dikembangkan kompetensinya dalam mengawal jalannya penyelenggaraan pemerintah desa.											



NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>Sasaran 5 : Meningkatkan Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b>											
06	Persentase kasus pengaduan masyarakat yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	-	-	90 %	95 %	95 %	95 %	100 %	66,67% (S.d. Triwulan 2)	95 %	95 %
<b>Catatan Analisis :</b> Hingga tahun 2019, realisasi capaian kinerja untuk sasaran ini melebihi target kinerja yang ditetapkan, yaitu 100% dari target 90%, dimana telah tertangani 1 Kasus dari 1 Laporan pengaduan yang telah diterima hingga bulan Desember 2019. Untuk tahun 2020, proses penanganan pengaduan masyarakat pada tahun 2020 masih berproses. Rendahnya jumlah laporan pengaduan masyarakat yang diterima, lebih disebabkan oleh karena belum terintegritasnya proses pelaporan pengaduan yang diterima oleh Inspektorat Daerah untuk ditangani sesuai kewenangan. Selain itu, laporan pengaduan masyarakat lebih banyak di sampaikan ke APH, sehingga kedepannya diperlukan sinergitas penanganan pengaduan masyarakat dengan APH (Aparat Penegak Hukum). Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat umumnya, lebih banyak terkait dengan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa, dan ini ditangani sesuai dengan kewenangan Inspektorat Daerah dengan tetap berkoordinasi dengan APH. Ketersediaan aparat pengawasan yang kompeten untuk dapat melakukan audit investigasi menjadi faktor pendorong dalam pelaksanaan tugas pengawasan ini. Namun demikian, peran Inspektorat Daerah selaku APIP, kedepannya masih perlu ditingkatkan dalam bentuk sosialisasi, asistensi ataupun pendampingan bagi perangkat desa dalam pengelolaan dana desa, dimana hal ini lebih efektif dan penting dalam meminimalisir laporan pengaduan masyarakat terkait penyimpangan dana desa.											
<b>Sasaran 6 : Meningkatkan Kinerja Penanganan Kasus Kepegawaian dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b>											
07	Persentase kasus kepegawaian yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	-	-	90 %	90 %	95 %	95 %	95 %	100 % (S.d. Triwulan 2)	95 %	95 %
<b>Catatan Analisis :</b> Hingga tahun 2019, realisasi capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 95%, melebihi target yang telah ditetapkan, dimana hanya tertangani 27 Kasus dari 28 Kasus Kepegawaian yang telah diterima hingga bulan Desember 2019 (termasuk kasus kepegawaian yang masih tersisa ditahun 2018). Penanganan Kasus Kepegawaian umumnya, lebih banyak terkait dengan permohonan izin perceraian dibandingkan dengan kasus pelanggaran disiplin PNS, dan ini ditangani sesuai dengan kewenangan Inspektorat Daerah dengan tetap berkoordinasi dengan BKPSDM dan Tim Terpadu Kabupaten. Hambatan terbesar dalam penanganan kasus ini, adalah padatnya jadwal penugasan pengawasan internal yang sifatnya mandatory audit dan rutin dalam pelaksanaannya, sementara ketersediaan Aparat pengawasan masih terbatas untuk ini dibandingkan dengan tingginya kasus kepegawaian yang diterima oleh Inspektorat Daerah. Sehingga, penanganan terkait kasus kepegawaian ini seringkali tidak diprioritaskan. Namun hal ini, akan menjadi bahan evaluasi perencanaan kedepannya, agar bisa lebih efektif dan efisien penanganannya.											
<b>Sasaran 7 : Meningkatkan Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penjaminan Mutu (Quality Assurance) dan Jasa Konsultasi (Consulting Advisory) bagi Kinerja Pemda</b>											
08	Persentase ketersediaan Pejabat Fungsional Pengawasan yang ber sertifikat ahli berdasarkan analisa kebutuhan SDM APIP	-	-	50 %	60 %	70 %	80 %	43 %	44 % (S.d. Triwulan 2)	55 %	65 %
<b>Catatan Analisis :</b> Capaian kinerja untuk sasaran strategis ini belum mencapai target indikator kinerja (50%) yang telah ditetapkan hingga Tahun 2019, dimana jumlah total Pejabat Fungsional Auditor, P2UPD dan Audiwan baru mencapai 43% atau 38 orang (Auditor 29 orang, P2UPD 7 orang, dan Audiwan 2 Orang) dari total jumlah 88 orang (Auditor 55 orang, P2UPD 28 orang, dan Audiwan 5 Orang) yang jadi Kebutuhan Aparat Pengawasan Inspektorat Kab. Bone berdasarkan analisis kebutuhan SDM yang tertuang dalam Peta Jabatan Inspektorat Daerah Kab. Bone. Dan terhadap target akhir dalam Renstra dan RPJMD Tahun 2018-2023, tingkat capaian kinerja ini masih cukup jauh dari target 90%. Kompetensi dari aparatur pengawasan yang ada juga masih sangat perlu ditingkatkan, khususnya kompetensi teknis yang dibutuhkan terkait dengan jenis pengawasan tertentu yang menjadi mandatory audit Inspektorat Daerah selaku APIP. Mengingat masih adanya kesenjangan dan terbatasnya jumlah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Daerah dibandingkan dengan kebutuhan organisasi dalam menghadapi tantangan kompleksitas beban kerja sesuai jumlah objek pemeriksaan dan luasnya wilayah pengawasan, maka ke depannya sangat diperlukan penambahan jumlah tenaga pemeriksa yang akan dipersiapkan untuk menjadi pejabat fungsional APIP dengan mempertimbangkan kapasitas dan kompetensi yang diperlukan oleh Inspektorat Kab. Bone berdasarkan analisa kebutuhan pegawai. Disamping itu, juga diklat penjenjangan/pengembangan profesi atau kompetensi, juga dilakukan Pelatihan Kantor Sendiri untuk peningkatan kualitas/kompetensi dalam pelaksanaan tugas pengawasan bagi bagi Aparat Pengawasan Inspektorat Daerah kab. Bone.											





NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>Sasaran 8 : Meningkatkan Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b>											
09	Hasil Assessment Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah berdasarkan Standar IACM (Internal Audit Capability Model)	Level 3 (Integrated)	-	Level 3 (Integrated) (Dengan Catatan Perbaikan)	Level 3 (Integrated) (Dengan Catatan Perbaikan)	Level 3 (Integrated) (Dengan Catatan Perbaikan)	Level 3 (Integrated) (Penuh)	Level 3 (Integrated) (Dengan Catatan Perbaikan)	- (Belum ada penilaian dari BPKP)	Level 3 (Integrated) (Dengan Catatan Perbaikan)	Level 3 (Integrated) (Penuh)
<b>Catatan Analisis :</b> Berdasarkan Laporan Hasil Penilaian (Quality Assessment) Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kab. Bone, yang dilakukan oleh BPKP pada Tahun 2018, Tingkat Kapabilitas APIP inspektorat Daerah Kab. Bone telah mencapai Level 3 dengan Catatan Perbaikan, dimana dari 6 Elemen Penilaian, 4 diantaranya telah mencapai level 3, kecuali elemen Pengelolaan SDM dan Praktik Profesional. Untuk tahun 2019, belum ada hasil penilaian terakhir Kapabilitas APIP yang telah dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provisin Sul-Sel, pada bulan Desember Tahun 2019. Namun demikian, hasil penilaian ini masih perlu dipertahankan dan bahkan ditingkatkan, mengingat infrastruktur kapabilitas APIP yang telah ada, perlu diupdate secara terus menerus, disamping penerapannya dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan juga masih sangat perlu dioptimalkan, sebelum proses pelaksanaan Penilaian/Assessment pada akhir tahun 2020 ini. Komitmen dan Kinerja Tim Kerja Peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kab. Bone perlu dilakukan dengan lebih baik, dengan pembagian tugas yang lebih terkoordinir dengan melibatkan seluruh stakeholder internal, serta kerjasama dengan BPKP selaku instansi pembina APIP yang sangat berperan dalam mendukung penguatan Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah. Penguatan Kapabilitas APIP ini hingga mencapai Level 3 (integrated) secara penuh, menjadi kewajiban bagi Inspektorat Daerah Kab. Bone, sebagaimana telah ditetapkan sebagai salah satu kriteria pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan juga dalam Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi, disamping menjadi salah satu target kinerja dalam RPJMN Tahun 2019-2024.											

Sumber Data : Renstra Inspektorat Daerah Periode Tahun 2018-2023  
Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2019  
Data Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2020 (hingga bulan Juni 2020)



### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah**

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance & clean government) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Kab. Bone merupakan tujuan utama pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan yang diemban oleh Inspektorat Kab. Bone. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut, kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Bone ditetapkan tolok ukurnya melalui penetapan indikator kinerja sebagaimana telah disajikan analisis pencapaiannya pada tabel 3 di atas.

Dari tabel tersebut, dapat dilihat sejauh mana tingkat kinerja pelayananan Inspektorat Daerah Kab. Bone berdasarkan hasil analisis pencapaian kinerja terhadap target akhir capaian kinerja dalam Renstra Tahun 2018-2023, yang terdiri dari 8 Sasaran beserta 9 Indikator Kinerjanya (IK). Dari hasil capaian kinerja ke 9 indikator kinerja tersebut, dapat diketahui bahwa hingga tahun 2019 dan proyeksi tahun 2020, 4 indikator kinerja telah memenuhi target tahunan yaitu indikator kinerja no. 1, 2, 5, 6, 7, dan no. 9, dan 3 indikator kinerja lainnya masih memerlukan optimalisasi kinerja pencapaiannya sebagai bahan evaluasi perencanaan kinerja kedepannya.

Terkait dengan hal tersebut, dari catatan analisis yang telah disajikan, maka yang perlu jadi fokus perhatian kedepannya sebagai isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone, antara lain :

1. Optimalisasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah harus menjadi sasaran utama dalam pelaksanaan peran Inspektorat Daerah selaku APIP, khususnya yang terkait dengan :
  - Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi;
  - Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dalam kerangka implementasi SAKIP;
  - Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah;
  - Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP;
  - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
  - Pencegahan dan Pemberantasan KKN; dan
  - Penguatan Kapabilitas APIP.
2. Proses Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI dan APIP harus ditingkatkan secara intensif guna mendorong terwujudnya akuntabilitas keuangan dan aset Pemerintah Kab. Bone, melalui koordinasi, monitoring dan evaluasi yang bersinergi dengan Tim Tindak Lanjut Kabupaten dan juga Pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kab. Bone.



3. Penanganan terhadap pengaduan masyarakat dan kasus kepegawaian sebagai salah satu bentuk pelayanan publik masih perlu ditingkatkan melalui pengembangan prosedur dan fasilitas yang memadai dalam kegiatan pelaksanaannya, khususnya pengaduan yang terkait dengan pengelolaan dana desa pada Pemerintahan Desa di Kab. Bone.
4. Profesionalisme dalam hal kompetensi, etika, integritas Sumber Daya Aparatur Pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone harus ditingkatkan dan dikembangkan secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi, dan juga untuk merespon dinamika perubahan peraturan-perundang-undangan terkait pemerintahan daerah dan juga tuntutan masyarakat yang semakin kritis akan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintahan.
5. Peran Inspektorat Kabupaten selaku APIP yang berperan sebagai Penjamin Mutu/Kualitas dan Fungsi Konsultatif (*quality assurance and partner consulting*) bagi OPD dan Pemerintah Desa, harus ditingkatkan kapabilitasnya ke Level 3 (Integrated) secara penuh dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, guna mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan & aset daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut di atas, kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diperlukan tindak lanjut pelaksanaannya untuk mendorong pencapaian target kinerja outcome/output dari program/kegiatan sesuai dengan target kinerja sasaran yang telah ditetapkan, antara lain sebagai berikut :

1. Perencanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) kedepannya harus berbasis resiko dengan mempertimbangkan isu-isu strategis (termasuk kondisi wabah COVID-19), kompetensi dan ketersediaan SDM serta anggaran yang ada, agar tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah tetap berjalan efektif dan efisien sesuai dengan arah dan kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur secara nasional oleh pemerintah pusat berdasarkan regulasi yang ada dan kewenangan pemerintah daerah;
2. Penguatan peran Inspektorat Daerah Kab. Bone selaku penjamin mutu (*quality assurer*) dan pemberi jasa konsultatif (*consultative advisory*) bagi OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan juga pemerintahan desa, harus ditingkatkan guna mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan pemerintahan daerah dan desa.



3. Penanganan pengaduan masyarakat dan kasus kepegawaian juga tetap harus diupayakan berjalan lebih baik sesuai dengan kewenangan Inspektorat Daerah seiring dengan peningkatan tuntutan masyarakat akan akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
4. Peningkatan Kapabilitas APIP menuju Level 3 (*integrated*) secara penuh sesuai standar IACM (*Internal Audit Capability Model*) harus segera dioptimalkan, khususnya yang terkait dengan pemenuhan ketersediaan SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas/kompetensinya, infrastruktur pengawasan (Pedoman/SOP/Kendali Mutu, dsb.), dan juga sarana prasarana serta anggaran berdasarkan kebutuhan organisasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan yang semakin kompleks;
5. Koordinasi dengan BPK, BPKP dan Inspektorat Provinsi Sul-Sel selaku mitra pengawasan, tetap harus dijaga dan ditingkatkan melalui konsultasi dan kerja sama pengawasan dalam peningkatan kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kab. Bone serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kab. Bone, khususnya yang terkait dengan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset pemerintah daerah maupun pemerintahan desa;

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi guna pencapaian target kinerja pelayanan perangkat daerah sesuai dengan Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bone, tentunya juga akan dipengaruhi oleh adanya permasalahan dan hambatan yang harus dihadapi oleh organisasi dan juga menjadi perhatian kedepannya, antara lain :

1. Kualitas Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang masih perlu ditingkatkan dalam pemenuhan standar pengawasan, sebagai akibat dari masih kurang optimalnya penerapan kendali mutu pengawasan,
2. Masih terbatasnya kompetensi aparatur pengawasan dari segi kuantitas dan kualitas dibandingkan dengan beban kerja berdasarkan luas wilayah dan objek pengawasan, termasuk aparatur (staf) sekretariat Inspektorat Daerah;
3. Infrastruktur pengawasan yang belum sepenuhnya memadai baik berupa SOP atau Pedoman Teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Pembinaan dan Pengawasan;
4. Sarana dan prasarana pengawasan yang belum memadai dibandingkan dengan kebutuhan aparatur pengawasan, yang meliputi ruangan gedung kantor beserta peralatan dan perlengkapannya (khususnya meubelur dan notebook) dan juga sarana operasional lapangan (kendaraan roda empat) dan alat ukur pemeriksaan;





#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Proses review terhadap rancangan awal RKPD dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2019 dilakukan dengan menbandingkan antara Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan Hasil Analisis Kebutuhan yang diperoleh dari evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya dan capaian target renstra, analisis kinerja pelayanan, potensi permasalahan dan hambatan, hingga isu-isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Proses ini diperlukan untuk lebih mempertajam rumusan program/kegiatan beserta outcome/outputnya agar lebih berorientasi pada hasil yang lebih efektif, efisien, ekonomis dan relevan dengan perkembangan isu-isu strategis terkait pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Keselarasan antara dokumen perencanaan secara vertikal antara Renja Perangkat Daerah dan RKPD Kabupaten juga menjadi tujuan dari proses review ini, dimana proses ini dapat memberikan jaminan yang memadai terkait konsistensi perencanaan terkait perumusan program/kegiatan yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pembangunan daerah pada tahun berikutnya.

Hal-hal yang menjadi catatan penting dari proses review ini, mencakup rumusan program/kegiatan, lokasi, indikator kinerja (outcome/output) beserta targetnya, dan juga kebutuhan dana/pagu indikatif untuk pelaksanaannya. Perbedaan-perbedaan yang ditemukan (terkait hal-hal tersebut di atas) dalam proses ini harus dijelaskan untuk hasil perencanaan yang lebih baik, berorientasi pada pencapaian hasil yang terukur dan tepat sasaran.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kab. Bone Tahun 2021 berdasarkan perbandingan terhadap hasil analisis kebutuhan terkait rumusan program/kegiatan, lokasi, indikator kinerja (outcome/output) beserta targetnya, dan juga kebutuhan dana/pagu indikatif untuk pelaksanaannya, dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini.



Tabel 4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kab. Bone Tahun 2021 – Inspektorat Daerah

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Kec. Tanete Riattang Barat	Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran setiap tahun anggaran	100 %	607.500.000	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Kec. Tanete Riattang Barat	Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran setiap tahun anggaran	100 %	1.396.935.050	Program Pendukung
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Penyediaan Jasa Komunikasi (telepon/faximile, internet, dan tv) sesuai rencana kebutuhan	36 Paket	25.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Penyediaan Jasa Komunikasi (telepon/faximile, internet, dan tv) sesuai rencana kebutuhan	36 Paket	66.420.000	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan per bulan
2.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi/ Tenaga Teknis lainnya yang dibayarkan upah kerja beserta asuransinya untuk pelaksanaan administrasi perkantoran	13 Orang	100.000.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi/ Tenaga Teknis lainnya yang dibayarkan upah kerja beserta asuransinya untuk pelaksanaan administrasi perkantoran	15 Orang	227.590.000	Disertai pemberian asuransi ketenagakerjaan sebagai kewajiban pemerintah bagi tenaga jasa Non-PNS
3.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan sesuai rencana kebutuhan	4 Paket	7.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan sesuai rencana kebutuhan	4 Paket	7.718.400	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan per triwulan
4.	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan	12 Paket	50.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan	12 Paket	43.500.000	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan per bulan
5.	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Dan Luar Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Keikutsertaan Aparat Inspektorat Daerah dalam kegiatan rutin pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	50 Kegiatan	250.000.000	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Dan Luar Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Keikutsertaan Aparat Inspektorat Daerah dalam kegiatan rutin pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	50 Kegiatan	770.922.000	Terdiri dari kegiatan rapat-rapat di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten
6.	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK), Barang Cetak & Penggandaan, serta Makanan & Minuman sesuai rencana kebutuhan	36 Paket	175.000.000	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK), Barang Cetak & Penggandaan, serta Makanan & Minuman sesuai rencana kebutuhan	36 Paket	280.784.650	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan per bulan (Terpisah masing-masing Paket Penyediaan ATK, Penyediaan Barang Cetak/ Penggandaan, dan Penyediaan Makan/minum)
2.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Kec. Tanete Riattang Barat	Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	100 %	1.855.725.000	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Kec. Tanete Riattang Barat	Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	100 %	3.578.947.421	Program Pendukung
7.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional sesuai rencana kebutuhan	6 Unit : - 4 Unit Mobil - 2 Unit Sepeda Motor	1.070.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional sesuai rencana kebutuhan	6 Unit : - 6 Unit Mobil - 0 Unit Sepeda Motor	1.904.520.000	Disesuaikan dengan prioritas kebutuhan operasional pengawasan



No.	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	10 Unit : - 1 Unit Sound System - 4 Unit Loudspeaker - 1 Unit Karpet Ruang Rapat - 1 Unit Papan Nama Kantor - 1 Unit Papan Himbauan/Informasi - 2 Unit Dispenser	56.000.000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	9 Unit : - 2 Unit TV - 1 Paket Gorden - 1 Unit Vacuum Cleaner - 5 Unit AC	131.783.564	Disesuaikan dengan prioritas kebutuhan perlengkapan gedung kantor yang belum lengkap
9.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	37 Unit : - 2 Unit PC Desktop - 10 Unit Notebook - 5 Unit Printer - 1 Unit Scanner - 1 Unit Proyektor - 6 Unit Kamera - 1 Paket CCTV - 4 Unit UPS/Stabilizer - 1 Unit Alat Potong Kertas - 2 Unit Meter Dorong - 2 Unit Roll Meter - 2 Unit Jangka Sorong	174.475.000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	79 Unit/Buah : - 3 Unit PC Desktop - 52 Unit Notebook - 3 Unit Printer - 4 Unit Scanner - 1 Unit Kamera - 6 Buah Alat Penghancur Kertas - 1 Unit Proyektor - 4 Buah Alat Ukur Jarak - 5 Buah Jaket Pelampung	707.937.400	Disesuaikan dengan prioritas kebutuhan peralatan kantor yang masih kurang untuk pelayanan administrasi perkantoran dan operasional pengawasan
10.	Pengadaan Mebeleur	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Pengadaan Mebeleur sesuai rencana kebutuhan	32 Buah : - 10 Bh Meja Kerja - 1 Bh Meja Rapat - 10 Bh Kursi Kerja - 5 Bh Kursi Rapat - 1 Bh Kursi Tunggu - 2 Bh Lemari Arsip - 1 Bh Rak Buku - 2 Bh Filling Kabinet	55.250.000	Pengadaan Mebeleur	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Pengadaan Mebeleur sesuai rencana kebutuhan	143 Buah/Set : - 69 Bh Meja Kerja - 69 Bh Kursi Kerja - 1 Set Kursi Sofa - 4 Bh Lemari Arsip	448.061.809	Disesuaikan dengan prioritas kebutuhan mebeleur kantor yang belum lengkap dan penggantian yang rusak
11.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan/Perlengkapan Pemeliharaan Kebersihan dan Pekerjaan Perbaikan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	5 Paket	225.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan/Perlengkapan Pemeliharaan Kebersihan dan Pekerjaan Perbaikan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	5 Paket	62.304.648	Terdiri dari 2 Jenis Paket, yaitu paket penyediaan peralatan/ perlengkapan kebersihan pertriwulan, dan paket pekerjaan perbaikan gedung kantor sesuai kondisi
12.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan Dinas secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	4 Paket	90.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan Dinas secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	4 Paket	268.840.000	Dianggarkan sebagai persediaan biaya pemeliharaan dan pembayaran pajak tahunan kendaraan sesuai estimasi



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
13.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	20 Paket	30.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	16 Paket	21.100.000	Dianggarkan sebagai persediaan biaya pemeliharaan sesuai estimasi kebutuhan
14.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	12 Paket	35.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	8 Paket	28.400.000	Dianggarkan sebagai persediaan biaya pemeliharaan sesuai estimasi kebutuhan
15.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Pemeliharaan Meubeleur Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	12 Paket	20.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Pemeliharaan Meubeleur Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	4 Paket	6.000.000	Dianggarkan sebagai persediaan biaya pemeliharaan sesuai estimasi kebutuhan pertriwulan
3.	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Kec. Tanete Riattang Barat	Cakupan Realisasi Pengadaan Kebutuhan Penunjang Disiplin Aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	100 %	25.000.000	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Kec. Tanete Riattang Barat	Cakupan Realisasi Pengadaan Kebutuhan Penunjang Disiplin Aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	100 %	49.640.000	Program Pendukung
16.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu bagi Pegawai Inspektorat Daerah sesuai rencana kebutuhan	1 Paket	25.000.000	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu bagi Pegawai Inspektorat Daerah sesuai rencana kebutuhan	1 Paket	49.640.000	Paket pengadaan berdasarkan jenis pakaian yang dibutuhkan
4.	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &amp; Keuangan</b>	Kec. Tanete Riattang Barat	Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan setiap tahun anggaran	100 %	17.500.000	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &amp; Keuangan</b>	Kec. Tanete Riattang Barat	Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan setiap tahun anggaran	100 %	15.879.500	Program Pendukung
17.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja Inspektorat Daerah yang tersusun	<u>7 Dokumen :</u> - Lap. Kinerja (LKj) - Data LPPD/LKPJ - Evaluasi Renja Per-Triwulan (4) - Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan	10.000.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja Inspektorat Daerah yang tersusun	<u>7 Dokumen :</u> - Lap. Kinerja (LKj) - Data LPPD/LKPJ - Evaluasi Renja Per-Triwulan (4) - Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan	6.656.500	Terdiri dari dokumen pelaporan rutin tahunan dan per triwulan
18.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Inspektorat Daerah yang tersusun	<u>25 Dokumen :</u> - Lap. Keuangan Tahunan (1) - SPJ Keuangan Bulanan (12) - Laporan Realisasi Fisik & Keuangan Bulanan (12)	7.500.000	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Inspektorat Daerah yang tersusun	<u>25 Dokumen :</u> - Lap. Keuangan Tahunan (1) - SPJ Keuangan Bulanan (12) - Laporan Realisasi Fisik & Keuangan Bulanan (12)	9.223.000	Terdiri dari dokumen pelaporan rutin tahunan, persemester, per triwulan & per bulan
5.	<b>Program Penunjang Pemerintahan Umum</b>	Kec. Tanete Riattang Barat	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum setiap tahun anggaran	100 %	95.000.000	<b>Program Penunjang Pemerintahan Umum</b>	Kec. Tanete Riattang Barat	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum setiap tahun anggaran	100 %	78.189.100	Program Pendukung





No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
19.	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja dan Penganggaran Inspektorat Daerah yang tersusun	<u>6 Dokumen :</u> - PKPT - Renja - Perjanjian Kinerja - RKA-SKPD - DPA SKPD - DPPA-SKPD	30.000.000	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja dan Penganggaran Inspektorat Daerah yang tersusun	<u>8 Dokumen :</u> - PKPT - Renja - Perubahan Renja - Perubahan Renstra - Perjanjian Kinerja - RKA-SKPD - DPA SKPD - DPPA-SKPD	41.098.000	Merupakan dokumen perencanaan kinerja dan anggaran rutin tahunan
20.	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Website Perangkat Daerah	1 Kegiatan	50.000.000	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Website Perangkat Daerah	1 Kegiatan	18.600.000	Berupa updating dan maintenance selama 1 tahun
21.	Promosi dan Pameran Pembangunan	Wilayah Kab. Bone	Jumlah Kegiatan Promosi/Pameran Pembangunan yang diikuti	1 Kegiatan	15.000.000	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Kegiatan Promosi/Pameran Pembangunan yang diikuti	1 Kegiatan	18.491.100	Berupa Publikasi Program Kegiatan Inspektorat dalam Pameran Pembangunan
6.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Pada Seluruh OPD & PemDes yang tersebar di 27 Kecamatan Sesuai Tujuan Pengawasan	Persentase OPD dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja minimal B (>60 - 70) berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	75 %	2.665.000.000	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Pada Seluruh OPD & PemDes yang tersebar di 27 Kecamatan Sesuai Tujuan Pengawasan	Persentase OPD dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja minimal B (>60 - 70) berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	75 %	3.405.193.500	Program Prioritas/Strategis
			Persentase OPD yang bersih dari temuan berdasarkan hasil audit pengelolaan keuangan dan aset daerah oleh BPK-RI	95 %				Persentase OPD yang bersih dari temuan berdasarkan hasil audit pengelolaan keuangan dan aset daerah oleh BPK-RI	95 %		
			Persentase penyelesaian tindak lanjut terhadap rekomendasi temuan hasil pemeriksaan (hingga tahun berkenaan) : 1. BPK-RI 2. APIP (BPKP, Itprov, Itkab)	- 90 % - 90 %				Persentase penyelesaian tindak lanjut terhadap rekomendasi temuan hasil pemeriksaan (hingga tahun berkenaan) : 1. BPK-RI 2. APIP (BPKP, Itprov, Itkab)	- 90 % - 90 %		
			Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Implementasi Reformasi Birokrasi	> 60 - 70				Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Implementasi Reformasi Birokrasi	> 60 - 70		
			Persentase OPD yang menerapkan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi)	70 %				Persentase OPD yang menerapkan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi)	70 %		
			Jumlah OPD dan PemDes yang bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Dari Total 438 = 39 Badan/Dinas + 27 Kecamatan + 44 Kelurahan + 328 PemDes)	425 OPD+PemDes				Jumlah OPD dan PemDes yang bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Dari Total 438 = 39 Badan/Dinas + 27 Kecamatan + 44 Kelurahan + 328 PemDes)	425 OPD+PemDes		
			Persentase realisasi penanganan kasus pengaduan masyarakat yang diterima sesuai kewenangan Inspektorat Daerah pada tahun berkenaan	95 %				Persentase realisasi penanganan kasus pengaduan masyarakat yang diterima sesuai kewenangan Inspektorat Daerah pada tahun berkenaan	95 %		



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Persentase realisasi penanganan kasus kepegawaian sesuai kewenangan Inspektorat Daerah pada tahun berkenaan	95 %				Persentase realisasi penanganan kasus kepegawaian sesuai kewenangan Inspektorat Daerah pada tahun berkenaan	95 %		
22.	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Pada Seluruh OPD, Kecamatan, Desa dan Sekolah (Tersebar di 27 Kecamatan)	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pengawasan Internal (Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, Monev dan Kegiatan Pengawasan Lainnya) berdasarkan PKPT	4 Laporan Triwulan	1.850.000.000	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Pada Seluruh OPD, Kecamatan, Desa dan Sekolah (Tersebar di 27 Kecamatan)	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pengawasan Internal (Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, Monev dan Kegiatan Pengawasan Lainnya) berdasarkan PKPT	4 Laporan Triwulan	2.549.724.750	Berdasarkan mandatory audit yang diatur oleh kebijakan pengawasan dari kemendagri dan isu-isu strategis daerah dengan berbasis resiko dan disesuaikan dengan ketersediaan SDM dan anggaran
23.	Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah	Dalam Wilayah Kab. Bone (d disesuaikan dengan kondisi kasus)	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	4 Laporan Triwulan	175.000.000	Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah	Dalam Wilayah Kab. Bone (d disesuaikan dengan kondisi kasus)	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	4 Laporan Triwulan	234.924.000	untuk penanganan kasus pengaduan masyarakat (Target 20 Kasus)
24.	Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya	Dalam Wilayah Kab. Bone (d disesuaikan dengan kondisi kasus)	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Kasus Kepegawaian sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	4 Laporan Triwulan	150.000.000	Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya	Dalam Wilayah Kab. Bone (d disesuaikan dengan kondisi kasus)	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Kasus Kepegawaian sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	4 Laporan Triwulan	158.292.000	untuk penanganan kasus kepegawaian (Target 24 Kasus)
25.	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Inventarisasi Data Temuan Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal secara periodik	4 Laporan Triwulan	15.000.000	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Inventarisasi Data Temuan Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal secara periodik	4 Laporan Triwulan	18.615.000	Berdasarkan hasil pemeriksaan tahun berjalan
26.	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Data Hasil Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Internal & Eksternal secara periodik	4 Laporan Triwulan	175.000.000	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Data Hasil Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Internal & Eksternal secara periodik	4 Laporan Triwulan	108.715.000	Berdasarkan hasil pemantauan terhadap temuan/rekomendasi pemeriksaan tahun sebelumnya
27.	Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Kegiatan Gelar Pengawasan Tingkat Kabupaten	1 kegiatan	150.000.000	Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Kegiatan Gelar Pengawasan Tingkat Kabupaten	1 kegiatan	252.727.750	Kerjasama dengan BPK, BPKP, Itprov dan APH (Kejaksanaan dan Kepolisian)
28.	Penanganan Laporan Gratifikasi, Whistle Blower System dan Benturan Kepentingan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Laporan Gratifikasi, Whistle Blower System dan Benturan Kepentingan	2 Laporan Per Semester	150.000.000	Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Laporan Gratifikasi, Whistle Blower System dan Benturan Kepentingan	2 Laporan Per Semester	82.195.000	untuk penanganan kasus kepegawaian (Target 5 Kasus dalam 1 tahun)



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase Jumlah Aparat Pengawas Inspektorat Daerah yang Bersertifikat keahlian sesuai kebutuhan hingga tahun berkenaan	70 %	450.000.000	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase Jumlah Aparat Pengawas Inspektorat Daerah yang Bersertifikat keahlian sesuai kebutuhan hingga tahun berkenaan	70 %	1.185.498.000	Program Prioritas/Strategis
29.	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	Relatif (Disesuaikan dengan lokasi penyelenggaraan diklat/bimtek)	Jumlah Kegiatan Diklat/Bimtek Pembentukan/Penjenjangan Ahli dan Pengembangan Profesi yang diikuti oleh Aparat Pengawasan	20 Kegiatan	400.000.000	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	Relatif (Disesuaikan dengan lokasi penyelenggaraan diklat/bimtek)	Jumlah Kegiatan Diklat/Bimtek Pembentukan/Penjenjangan Ahli dan Pengembangan Profesi yang diikuti oleh Aparat Pengawasan	25 Kegiatan	941.298.000	Disesuaikan dengan kebutuhan diklat/bimtek bagi peningkatan kompetensi SDM pengawasan
30.	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) terkait pengawasan internal	2 PKS	50.000.000	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) terkait pengawasan internal	2 PKS	244.200.000	Disesuaikan dengan kebutuhan jenis kompetensi yang dibutuhkan setiap aparat pengawasan
8.	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase Jumlah Elemen Penilaian (Assessment) Peningkatan Kapabilitas APIP yang mencapai Level 3 hingga tahun berkenaan	100 % (6 dari 6 Elemen)	45.000.000	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase Jumlah Elemen Penilaian (Assessment) Peningkatan Kapabilitas APIP yang mencapai Level 3 hingga tahun berkenaan	100 % (6 dari 6 Elemen)	46.530.000	Program Prioritas/Strategis
31.	Penyusunan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Kegiatan Penyusunan Dokumen Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP menuju Level 3	1 Kegiatan	45.000.000	Penyusunan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Kegiatan Penyusunan Dokumen Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP menuju Level 3	1 Kegiatan	46.530.000	Terdiri dari dokumen pelaporan rutin tahunan dan per triwulan
TOTAL PAGU INDIKATIF					5.760.725.000	TOTAL PAGU INDIKATIF					9.756.812.571

Secara umum, hasil analisis kebutuhan terhadap rencana program dan kegiatan Inspektorat Daerah dalam rancangan awal RKPD Kab. Bone Tahun 2021, tidak mengalami perubahan ataupun penyesuaian, baik dari segi jumlah, indikator dan target kinerja, serta pagu anggaran yang direncanakan.

Demikian pula penetapan rumusan indikator kinerja outcome dan output dari program dan kegiatan yang dilakukan telah diupayakan berorientasi hasil dan memenuhi kriteria indikator yang baik (SMART-Specific, Measurable, Achiavable, Relevan, Time Bound) dengan target kinerja tahunan dan pagu indikatif yang disesuaikan analisa kebutuhan berdasarkan hasil kajian evaluasi kinerja tahun sebelumnya hingga tahun berjalan serta perkembangan isu-isu strategis yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Catatan penting yang perlu disajikan hanya terkait dengan penjelasan sifat prioritas/strategisnya program/kegiatan serta penjelasan terkait target capaian kinerja sesuai indikator kinerja yang dirumuskan.



## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kab. Bone merupakan perangkat daerah yang secara tidak langsung menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, melalui urusan pembinaan dan pengawasan internal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kab. Bone. Sehingga keterkaitan secara langsung dengan kegiatan masyarakat, LSM, serta organisasi lainnya selaku stakeholder eksternal pemerintahan daerah, juga tidak terlalu menonjol dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, hingga saat ini Inspektorat Daerah Kab. Bone belum pernah mendapat usulan program atau kegiatan secara langsung dari para stakeholder eksternal tersebut untuk dimasukkan dalam rencana kerja tahunan.

Namun demikian, Inspektorat Daerah Kab. Bone, tetap mengawal isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang selanjutnya diserap masuk dalam perencanaan kinerja tahunan. Isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat biasanya dalam bentuk pengaduan masyarakat, dan umumnya merupakan hal-hal yang terkait pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Laporan pengaduan tersebut dijadikan sebagai salah satu aspek pengawasan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah. Penanganan pengaduan masyarakat ini dilaksanakan dalam batas-batas kewenangan selaku APIP berdasarkan penugasan oleh Bupati sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk didalamnya koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH).





### BAB III

## TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka menjamin keselarasan arah dan kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran prioritas pembangunan nasional, maka setiap tahunnya ditetapkan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 40 Tahun 2020, dengan tema RKP Tahun 2021 (RPJMN 2020-2024) secara nasional, yaitu “**Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial**” di tengah masih mewabahnya pandemi COVID-19, dengan fokus pembangunan diarahkan pada Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana, dengan sasaran dan target yang harus dicapai antara lain :

1. *Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 4,5-5,5 % dengan tingkat inflasi secara nasional berkisar antara 3,0 %;*
2. *Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 9,2 – 9,7 %; IPM menjadi 72,78-72,90; gini rasio pada kisaran 0,377 – 0,379; tingkat pengangguran terbuka 7,5-8,2 %;*
3. *Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 3,9-5,1 % , Jawa-Bali 4,8-5,5 % , Kalimantan 3,6-5,7 % , Sulawesi 5,4-7,0 % , Nusa Tenggara 3,5-5,2 % , Maluku 5,2-6,2 % , dan Papua 2,6-5,8 %.*

Sasaran dan prioritas pembangunan nasional pada Tahun 2021 sesuai arahan Presiden, meliputi :

1. *Pembangunan Sumber Daya Manusia;*
2. *Pembangunan Infrastruktur;*
3. *Penyederhanaan Regulasi;*
4. *Penyederhanaan Birokrasi; dan*
5. *Transformasi Ekonomi;.*



Hal tersebut diatas menjadi rujukan bagi setiap pemerintah daerah, termasuk setiap perangkat daerah, dalam merumuskan prioritas tujuan dan sasaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun 2021.

Terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah selaku APIP Pemerintah Daerah dalam urusan pembinaan dan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan juga pemerintahan desa, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, PMDN No. 40 Tahun 2020 tidak mengatur secara khusus arah dan kebijakan pengawasan internal pemerintah daerah oleh Inspektorat Daerah secara nasional. Namun pada prinsipnya, Inspektorat Daerah selaku APIP, memiliki peran penting sekaligus kewajiban untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah agar berjalan dengan tata kelola yang baik dan selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat dalam mewujudkan prioritas pembangunan nasional. Dalam PMDN Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, diatur beberapa hal strategis terkait penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah akan dialokasikan penganggaran program dan kegiatannya, yang meliputi :

- 1) Kinerja rutin pengawasan, meliputi: reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu RKA SKPD, reviu LKPD, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan serentak kas opname, pemeriksaan pajak pusat dan PNPB, evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP;
- 2) Pengawasan prioritas nasional meliputi: monitoring dan evaluasi Dana Desa, dan BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsive gender, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dan penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D);
- 3) Pengawasan reformasi birokrasi, meliputi: penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap pemerintahan desa, dan evaluasi pelayanan publik;
- 4) Penegakan integritas, meliputi: penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan bantuan kepentingan, survey penegakan integritas dan penanganan Whistle Blower System;



- 5) Kegiatan reviu DAK Fisik yang bersumber dari alokasi 5% (lima perseratus) alokasi dana penunjang DAK Fisik sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik 2019;
- 6) Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah oleh Perangkat Daerah dalam pencapaian SPM dan NSPK masing-masing urusan dan kualitas layanan pemerintahan daerah agar lebih optimal dan secara konsisten dapat tercapai dengan lebih baik;
- 7) Peningkatan kapasitas APIP secara bertahap sehingga dapat berperan sebagai garda depan dalam upaya pencegahan korupsi di internal Pemerintahan Daerah dan berada pada level 3 (tiga) secara penuh di tahun 2021, melalui penguatan pada area peran dan layanan, pengelolaan SDM, praktek pengawasan, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi serta struktur tata kelola pengawasan;
- 8) Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) BPK dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah, sehingga kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengembalian nilai kerugian negara/daerah dapat segera diselesaikan.

Berdasarkan arah dan kebijakan pembinaan dan pengawasan internal sebagaimana tersebut di atas, maka hal tersebut menjadi prioritas kegiatan pengawasan internal yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah, dan juga disinkronisasikan dengan pencapaian target kinerja outcome/output program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kab. Bone pada tahun 2021.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah

Visi dan Misi Pemerintah Kab. Bone sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kab. Bone Tahun 2018-2023 yang ditetapkan sebagai visi dan misi pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Bone terpilih, merupakan pedoman dan arah bagi penetapan tujuan dan sasaran setiap perangkat daerah dalam lingkup pemerintah Kab. Bone, sebagaimana telah dijabarkan dalam Renstra setiap perangkat daerah, termasuk Inspektorat Daerah Kab. Bone.

Visi Pemerintah Kab. Bone Tahun 2018-2023, yaitu :

**Masyarakat Bone Yang MaBeSSa  
(Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera)**



Visi tersebut di atas kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi, strategi hingga arah kebijakan yang menjadi tema pembangunan dalam RKPD setiap tahunnya. Adapun tema pembangunan dalam RKPD Pemerintah Kab. Bone Tahun 2021 yang telah diselaraskan dengan tema RKP Nasional dan RKPD Pemerintah Provinsi, yaitu :

**Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Sosial didukung  
Pembangunan Infrastruktur dan Kualitas SDM**

Salah satu misi Pemerintah Kab. Bone pada Tahun 2018-2023 yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone, yaitu sebagai berikut :

**Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan  
Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)**

Sejalan dengan misi ini, salah satu prioritas Pemerintah Kab. Bone dalam RKPD Tahun 2021, yaitu “*Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola serta Pelayanan Publik*”, menjadi isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone, yang selaras dengan rumusan tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Daerah Kab. Bone untuk Tahun 2021 yang dijabarkan dari Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2018-2023.

Rumusan Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2021, yaitu sebagai berikut :

**Tujuan 1** : *Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah.*

Dengan **Sasaran** :

1. *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.*
2. *Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah.*

**Tujuan 2** : *Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik, Bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).*

Dengan **Sasaran** :

3. *Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah.*
4. *Meningkatnya Kepatuhan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa atas Peraturan Perundang-undangan dalam Pengendalian Internal & Pencegahan KKN.*



**Tujuan 3** : Meningkatkan Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Kasus Kepegawaian untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan dan akuntabel.

Dengan **Sasaran** :

5. Meningkatnya Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Meningkatnya Kinerja Penanganan Kasus Kepegawaian dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

**Tujuan 4** : Meningkatkan Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dengan **Sasaran** :

7. Meningkatnya Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penjaminan Mutu (Quality Assurance) dan Jasa Konsultasi (Consulting Advisory) bagi Kinerja Pemerintah Daerah

**Tujuan 5** : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pengawasan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dengan **Sasaran** :

8. Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja (*dampak*) beserta target kinerja dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka pendek pada tahun 2021, termasuk rencana program/kegiatan terkait, dapat dilihat pada tabel berikut ini :





Tabel 5. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah beserta Program dan Kegiatan Tahun 2021 – Inspektorat Daerah Kab. Bone

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TUJUAN (TAHUN 2023)	TARGET SASARAN TAHUN 2021	PROGRAM & KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP</li> </ul>	A ( >80 – 90 )	BB ( >70 – 80 )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</li> <li>Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala</li> <li>Inventarisasi Temuan Pengawasan</li> <li>Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan</li> <li>Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif</li> <li>Penanganan Laporan Gratifikasi, Whistle Blower System dan Benturan Kepentingan</li> </ul>
	2. Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opini BPK-RI berdasarkan Hasil Audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)</li> </ul>	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	
2. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik, Bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	3. Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah</li> </ul>	BB ( >70 – 80 )	B ( >60 – 70 )	
	4. Meningkatnya Kepatuhan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa atas Peraturan Perundang-undangan dalam Pengendalian Internal & Pencegahan KKN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)</li> </ul>	Level 3 (Terdefinisi)	Level 2 (Berkembang)	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase OPD dan PemDes yang bersih dari temuan tindak pidana korupsi yang material</li> </ul>	99 %	95 %	
3. Meningkatkan Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Kasus Kepegawaian untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan dan akuntabel	5. Meningkatnya Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase kasus pengaduan masyarakat yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah</li> </ul>	100 %	95 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</li> <li>Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah</li> <li>Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya</li> </ul>
	6. Meningkatnya Kinerja Penanganan Kasus Kepegawaian dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase kasus kepegawaian yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah</li> </ul>	100 %	95 %	



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TUJUAN (TAHUN 2023)	TARGET SASARAN TAHUN 2021	PROGRAM & KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Meningkatkan Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	7. Meningkatnya Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penjaminan Mutu (Quality Assurance) dan Jasa Konsultasi (Consulting Advisory) bagi Kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"><li>Persentase ketersediaan Pejabat Fungsional Pengawasan yang bersertifikat ahli berdasarkan analisa kebutuhan SDM APIP</li></ul>	90 %	70 %	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan.<ul style="list-style-type: none"><li>• Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</li><li>• Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja</li></ul></li></ul>
5. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pengawasan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	8. Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"><li>Hasil Assessment Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah berdasarkan Standar IACM (Internal Audit Capability Model)</li></ul>	Level 3 (Integrated) Penuh	Level 3 (Integrated) Dengan Catatan Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyusunan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan</li></ul></li></ul>
<div>Kelima Program beserta 21 Kegiatan didalamnya ini merupakan Program dan Kegiatan Penunjang yang tergabung dalam Sasaran ke-8 untuk menunjang pelaksanaan Program dan Kegiatan Utama lainnya dalam mencapai ke-5 tujuan dan 8 sasaran strategis Inspektorat Kab. Bone sebagaimana tersebut di atas.</div>					<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Program Penunjang Pemerintahan Umum</li><li>➤ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &amp; Keuangan</li><li>➤ Program Peningkatan Disiplin Aparatur</li><li>➤ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</li><li>➤ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</li></ul>





**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**PERANGKAT DAERAH**

**4.1. Gambaran Umum Alokasi Anggaran Inspektorat Daerah**

Dalam rangka pelaksanaan tupoksi Inspektorat Daerah dalam rentang periode lima tahun (Renstra) berjalan (Tahun 2018-2023), maka pada tahun 2018-2020 telah dialokasikan anggaran program dan kegiatan, dengan nilai sekitar 0,3-0,6 % dari total belanja APBD Kab. Bone, dengan rincian anggaran sebagai berikut :

Tabel 6.  
Alokasi Anggaran Inspektorat Kab. Bone Tahun 2018-2020 dan Proyeksi Tahun 2021

TAHUN	PAGU ANGGARAN			PROSENTASE terhadap Total Belanja APBD
	BEL. TIDAK LANGSUNG (Gaji & Tunjangan PNS)	BELANJA LANGSUNG (Program dan Kegiatan)	TOTAL PAGU ANGGARAN	
2018	Rp. 4.418.991.531,-	Rp. 3.250.000.000,-	Rp. 7.668.991.531,-	0,3 %
2019	Rp. 6.018.959.801,-	Rp. 3.115.790.000,-	Rp. 9.134.749.801,-	0,3 %
2020	Rp. 8.228.065.251,-	Rp. 6.772.025.250,-	Rp. 15.000.090.501,-	0,6 %
2021	Rp. 9.934.783.779,-	Rp. 9.756.812.571,-	Rp. 19.691.596.350,-	± 0,75 %

Sumber Data : DPA/DPPA-SKPD T.A. 2018-2020 dan Pra-RKA T.A. 2021 - Inspektorat Daerah Kab. Bone.

Nilai Pagu Anggaran Belanja Langsung Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2021 pada tabel di atas merupakan nilai pagu indikatif yang diperoleh dari analisis kebutuhan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan untuk proyeksi penganggaran dalam RKPD T.A. 2021 berdasarkan Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018-2023. Nilai pagu indikatif tersebut diperkirakan telah melebihi pagu minimal 0,5% dari estimasi total nilai Belanja Langsung APBD Tahun 2021 nanti. Nilai pagu indikatif ini yang diperoleh berdasarkan kebutuhan Inspektorat Daerah Kab. Bone telah diupayakan berdasarkan prinsip “*Money Follow Program*” sesuai beban dan wilayah kerja pengawasan, dimana anggaran ini direncanakan berdasarkan kebutuhan riil pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian hasil yang efektif, efisien, dan ekonomis sesuai dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang akan dicapai pada tahun 2021.

Dari tabel tersebut di atas, jelas tergambar bahwa persentase anggaran Inspektorat Daerah Kab. Bone terhadap APBD untuk tahun 2018-2020, meningkat sangat signifikan hingga tahun 2020. Hal ini didorong oleh komitmen Pemerintah Kab. Bone untuk menjalankan amanah Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD T.A. 2021, yang menetapkan bahwa Persentase Anggaran untuk Inspektorat Daerah selaku APIP minimal 0,5% dari Total Belanja Daerah dan lebih dari Rp. 15 Milyar untuk APBD diatas Rp. 2 Trilyun.



Olehnya itu, sejalan dengan prinsip “*Money Follow Program*” yang merupakan prinsip dasar dalam penganggaran, juga ditetapkan agar pemanfaatan nilai anggaran untuk Inspektorat Daerah ini diarahkan pada penguatan program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan mengacu pada PMDN Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD T.A. 2021 dan PMDN Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 , yang meliputi :

- *Kegiatan Pengawasan, yaitu :*
  1. *Kinerja rutin pengawasan, meliputi: reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu RKA-SKPD, reviu LKPD, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, reviu realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK-Fisik, pemeriksaan serentak kas opname, pemeriksaan pajak pusat dan PNBPP, evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP;*
  2. *Pengawasan prioritas nasional meliputi: monitoring dan evaluasi Dana Desa, dan BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsive gender, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi;*
  3. *Pengawasan reformasi birokrasi, meliputi: penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap pemerintahan desa dan evaluasi pelayanan publik;*
  4. *Penegakan integritas, meliputi: penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan bantuan kepentingan, survey penegakan integritas dan penanganan Whistle Blower System.*
- *Kegiatan Non Pengawasan, seperti pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis untuk peningkatan kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Aparatur Pengawasan*
- *Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pengawasan, seperti laptop, alat ukur dan kendaraan operasional, dan sebagainya untuk menunjang pelaksanaan pengawasan.*





#### **4.2. Program & Kegiatan serta Pendanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022**

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka pendek dan jangka menengah berdasarkan Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023 serta hasil kajian terhadap isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, ditetapkanlah program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja tujuan/sasaran strategis setiap tahunnya.

Disamping untuk mendorong pencapaian visi dan misi pemerintah daerah, dalam perencanaan kinerja tahun 2021, pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah juga diarahkan untuk mendorong pencapaian target sasaran pembangunan nasional yang terkait Pencapaian SDGs, Pencapaian NSPK dan SPM, dan sebagainya, berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kab. Bone, termasuk Pemerintah Desa. Hal-hal tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Bone.

Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Bone tahun 2021, direncanakan terdiri dari 8 Program dan 31 Kegiatan, yang terbagi atas 3 Program Prioritas dengan 10 Kegiatan dan 5 Program Pendukung dengan 21 Kegiatan yang kesemuanya difokuskan pada pencapaian target indikator tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah, seperti tersaji pada tabel 5 (hal. 39) di Bab III sebelumnya.

Ketiga program prioritas diarahkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi utama Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam bentuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kualitas SDM, dan peningkatan kapabilitas APIP sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai. Sementara kelima program lainnya merupakan program rutin (generik) terkait pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana prasarana, peningkatan disiplin aparatur, perencanaan dan penganggaran serta pelaporan kinerja yang diarahkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program prioritas Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Tahun 2021.

Berdasarkan indikator sasaran yang akan dicapai pada tahun 2021, maka ditetapkan pula indikator dan target kinerja program dan kegiatan yang merupakan outcome, output, dan input masing-masing program dan kegiatan yang direncanakan. Ditetapkan pula dana atau anggaran sebagai input program/kegiatan merupakan pagu rencana/pagu indikatif yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2021 dan proyeksi



tahun 2022. Selain itu, ditentukan juga lokasi dan sumber dana dalam pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Bone.

Setelah melalui perhitungan kebutuhan riil anggaran, yang disesuaikan dengan target kinerja (outcome/output) program dan kegiatan, rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022, secara lengkap dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini ;



Tabel 7. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 – Inspektorat Daerah Kab. Bone

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2022	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1				URUSAN WAJIB								
1	20			OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN								
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran setiap tahun anggaran	Kec. Tanete Riattang Barat	100 %	Rp. 1.396.935.050	DAU-APBD	Program Pendukung	100 %	Rp. 1.377.600.000
1	20	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Paket Penyediaan Jasa Komunikasi (telepon/faximile, internet, dan tv) sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	36 Paket	Rp. 66.420.000	DAU-APBD	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan per bulan (3 Jenis)	36 Paket	Rp. 67.500.000
1	20	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi/ Tenaga Teknis lainnya yang dibayarkan upah kerja beserta asuransinya untuk pelaksanaan administrasi perkantoran	Kec. Tanete Riattang Barat	15 Orang	Rp. 227.590.000	DAU-APBD	Disertai pemberian asuransi ketenagakerjaan sebagai kewajiban pemerintah	15 Orang	Rp. 230.000.000
1	20	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	4 Paket	Rp. 7.718.400	DAU-APBD	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan per triwulan	4 Paket	Rp. 8.000.000
1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	12 Paket	Rp. 43.500.000	DAU-APBD	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan per bulan	12 Paket	Rp. 45.000.000
1	20	01	23	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Dan Luar Daerah	Jumlah Keikutsertaan Aparat Inspektorat Daerah dalam kegiatan rutin pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	50 Kegiatan	Rp. 770.922.000	DAU-APBD	Terdiri dari kegiatan rapat-rapat di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten	50 Kegiatan	Rp. 775.000.000
1	20	01	24	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK), Barang Cetakan & Penggandaan, serta Makanan & Minuman sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	36 Paket	Rp. 280.784.650	DAU-APBD	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan per bulan (3 jenis)	36 Paket	Rp. 295.000.000
1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	Kec. Tanete Riattang Barat	100 %	Rp. 3.578.947.421	DAU-APBD	Program Pendukung	100 %	Rp. 3.846.500.000
1	20	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	6 Unit : - 6 Unit Mobil	Rp. 1.904.520.000	DAU-APBD	Disesuaikan dengan prioritas kebutuhan operasional pengawasan	6 Unit : - 4 Unit Mobil - 2 Unit Sepeda Motor	Rp. 2.000.000.000
1	20	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	9 Unit : - 2 Unit TV - 1 Paket Gorden - 1 Unit Vacuum Cleaner - 5 Unit AC	Rp. 131.783.564	DAU-APBD	Disesuaikan dengan prioritas kebutuhan perlengkapan gedung kantor yang belum lengkap	10 Unit/Set : - 1 Set Sound System - 4 Unit Loudspeaker Mobile - 1 Paket Karpet - 1 Unit Papan Nama Kantor - 1 Unit Papan Himbauan/Informasi - 2 Unit Dispenser	Rp. 150.000.000



Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2022	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	20	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	79 Unit/Buah : - 3 Unit PC Desktop - 52 Unit Notebook - 3 Unit Printer - 4 Unit Scanner - 1 Unit Kamera - 6 Buah Alat Penghancur Kertas - 1 Unit Proyektor - 4 Buah Alat Ukur Jarak - 5 Buah Jaket Pelampung	Rp. 707.937.400	DAU-APBD	Disesuaikan dengan prioritas kebutuhan peralatan kantor yang masih kurang untuk pelayanan administrasi perkantoran dan operasional pengawasan	37 Unit : - 2 Unit PC Desktop - 10 Unit Notebook - 5 Unit Printer - 1 Unit Scanner - 4 Unit Proyektor Mini - 1 Paket CCTV (20 Titik) - 4 Unit Meter Dorong - 4 Unit Roll Meter - 4 Unit Jangka Sorong - 2 Unit Penunjuk Waktu	Rp. 500.000.000
1	20	02	10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Meubeleur sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	143 Buah/Set : - 69 Bh Meja Kerja - 69 Bh Kursi Kerja - 1 Set Kursi Sofa - 4 Bh Lemari Arsip	Rp. 448.061.809	DAU-APBD	Disesuaikan dengan prioritas kebutuhan meubeleur kantor yang belum lengkap dan penggantian yang rusak	131 Buah : - 20 Bh Meja Kerja - 1 Bh Meja Rapat - 20 Bh Kursi Kerja - 20 Bh Kursi Rapat - 3 Bh Kursi Tunggu - 5 Bh Lemari Arsip - 2 Bh Rak Buku - 60 Bh Filling Kabinet	Rp. 500.000.000
1	20	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan/Perlengkapan Pemeliharaan Kebersihan dan Pekerjaan Perbaikan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	5 Paket	Rp. 62.304.648	DAU-APBD	Terdiri dari 2 Jenis Paket, yaitu paket penyediaan peralatan/ perlengkapan kebersihan pertriwulan, dan paket pekerjaan perbaikan gedung kantor sesuai kondisi	8 Paket	Rp. 362.500.000
1	20	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan Dinas secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	4 Paket	Rp. 268.840.000	DAU-APBD	Dianggarkan sebagai persediaan biaya pemeliharaan dan pembayaran pajak STNK sesuai estimasi kebutuhan pertriwulan	4 Paket	Rp. 275.000.000
1	20	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Paket Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	16 Paket	Rp. 21.100.000	DAU-APBD	Dianggarkan sebagai persediaan biaya pemeliharaan sesuai estimasi kebutuhan pertriwulan (4 Jenis)	16 Paket	Rp. 22.500.000
1	20	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Paket Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	8 Paket	Rp. 28.400.000	DAU-APBD	Dianggarkan sebagai persediaan biaya pemeliharaan sesuai estimasi kebutuhan pertriwulan (2 Jenis)	8 Paket	Rp. 30.000.000
1	20	02	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur Gedung Kantor	Jumlah Paket Pemeliharaan Meubeleur Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	4 Paket	Rp. 6.000.000	DAU-APBD	Dianggarkan sebagai persediaan biaya pemeliharaan sesuai estimasi kebutuhan pertriwulan	4 Paket	Rp. 6.500.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2022		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	20	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Realisasi Pengadaan Kebutuhan Penunjang Disiplin Aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	Kec. Tanete Riattang Barat	100 %	Rp. 49.640.000	DAU-APBD	Program Pendukung	100 %	Rp. 50.000.000
1	20	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu bagi Pegawai Inspektorat Daerah sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	1 Paket (1 Jenis)	Rp. 49.640.000	DAU-APBD	Paket pengadaan berdasarkan jenis pakaian yang dibutuhkan (Total 4 Jenis)	1 Paket (1 Jenis)	Rp. 50.000.000
1	20	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan setiap tahun anggaran	Kec. Tanete Riattang Barat	100 %	Rp. 15.879.500	DAU-APBD	Program Pendukung	100 %	Rp. 19.025.000
1	20	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja Inspektorat Daerah yang tersusun	Kec. Tanete Riattang Barat	7 Dokumen : - Lap. Kinerja (LKj) - Data LPPD/LKPJ - Evaluasi Renja Per-Triwulan (4) - Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan	Rp. 6.656.500	DAU-APBD	Terdiri dari dokumen pelaporan rutin tahunan dan per triwulan	7 Dokumen : - Lap. Kinerja (LKj) - Data LPPD/LKPJ - Evaluasi Renja Per-Triwulan (4) - Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan	Rp. 9.025.000
1	20	06	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Inspektorat Daerah yang tersusun	Kec. Tanete Riattang Barat	25 Dokumen : - Lap. Keuangan Tahunan (1) - SPJ Keuangan Bulanan (12) - Laporan Realisasi Fisik & Keuangan Bulanan (12)	Rp. 9.223.000	DAU-APBD	Terdiri dari dokumen pelaporan rutin tahunan & per bulan	25 Dokumen : - Lap. Keuangan Tahunan (1) - SPJ Keuangan Bulanan (12) - Laporan Realisasi Fisik & Keuangan Bulanan (12)	Rp. 10.000.000
1	20	08		Program Penunjang Pemerintahan Umum	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum setiap tahun anggaran	Kec. Tanete Riattang Barat	100 %	Rp. 78.189.100	DAU-APBD	Program Pendukung	100 %	Rp. 81.375.000
1	20	08	01	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja dan Penganggaran Inspektorat Daerah yang tersusun	Kec. Tanete Riattang Barat	8 Dokumen : - PKPT - Renja - Perubahan Renja - Perubahan Renstra - Perjanjian Kinerja - RKA-SKPD - DPA SKPD - DPPA-SKPD	Rp. 41.098.000	DAU-APBD	Merupakan dokumen perencanaan kinerja dan anggaran rutin tahunan	7 Jenis Dokumen : - PKPT - Renja - Perubahan Renja - Perjanjian Kinerja - RKA-SKPD - DPA SKPD - DPPA-SKPD	Rp. 44.250.000
1	20	08	02	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	1 Kegiatan	Rp. 18.600.000	DAU-APBD	Berupa updating dan maintenance website selama 1 tahun	1 Kegiatan	Rp. 18.600.000
1	20	08	03	Promosi dan Pameran Pembangunan	Jumlah Kegiatan Promosi/Pameran Pembangunan yang diikuti	Kec. Tanete Riattang Barat	1 Kegiatan	Rp. 18.491.100	DAU-APBD	Berupa Publikasi Program Kegiatan Inspektorat dalam Pameran Pembangunan	1 Kegiatan	Rp. 18.525.000
1	20	20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase OPD dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja minimal B (>60 - 70) berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	Kab. Bone	75 %	Rp. 3.405.193.500	DAU-APBD	Program Prioritas/Strategis	85 %	Rp. 3.730.000.000
				Persentase OPD yang bersih dari temuan berdasarkan hasil audit pengelolaan keuangan dan aset daerah oleh BPK-RI	95 %		100 %					
				Persentase penyelesaian tindak lanjut terhadap rekomendasi temuan hasil pemeriksaan (hingga tahun berkenaan) : 1. BPK-RI 2. APIP (BPKP, Itprov, Itkab)	- 90 % - 90 %		- 95 % - 95 %					





Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2022	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Implementasi Reformasi Birokrasi		> 60 - 70				> 60 - 70	
						Persentase OPD yang menerapkan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi)		70 %				80 %	
						Jumlah OPD dan PemDes yang bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Dari Total 438 = 39 Badan/Dinas + 27 Kecamatan + 44 Kelurahan + 328 PemDes)		425 OPD+PemDes				430 OPD+PemDes	
						Persentase realisasi penanganan kasus pengaduan masyarakat yang diterima sesuai kewenangan Inspektorat Daerah pada tahun berkenaan		95 %				100 %	
						Persentase realisasi penanganan kasus kepegawaian sesuai kewenangan Inspektorat Daerah pada tahun berkenaan		95 %				100 %	
1	20	20	01		Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pengawasan Internal (Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, Monev dan Kegiatan Pengawasan Lainnya) berdasarkan PKPT	Pada Seluruh OPD, Kecamatan, Desa dan Sekolah (Tersebar di 27 Kecamatan)	4 Laporan Triwulan	Rp. 2.549.724.750	DAU-APBD	Berdasarkan mandatory audit yang diatur oleh kebijakan pengawasan dari kemendagri dan isu-isu strategis daerah dengan berbasis resiko dan disesuaikan dengan ketersediaan SDM dan anggaran	4 Laporan Triwulan	Rp. 2.700.000.000
1	20	20	02		Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	Dalam Wilayah Kab. Bone (d disesuaikan dengan kondisi kasus)	4 Laporan Triwulan	Rp. 234.924.000	DAU-APBD	untuk penanganan kasus pengaduan masyarakat (Target 20 Kasus)	4 Laporan Triwulan	Rp. 300.000.000
1	20	20	04		Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Kasus Kepegawaian sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	Dalam Wilayah Kab. Bone (d disesuaikan dengan kondisi kasus)	4 Laporan Triwulan	Rp. 158.292.000	DAU-APBD	untuk penanganan kasus kepegawaian (Target 24 Kasus)	4 Laporan Triwulan	Rp. 165.000.000
1	20	20	05		Inventarisasi Temuan Pengawasan	Jumlah Laporan Inventarisasi Data Temuan Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal secara periodik	Kec. Tanete Riattang Barat	4 Laporan Triwulan	Rp. 18.615.000	DAU-APBD	Berdasarkan hasil pemeriksaan tahun berjalan	4 Laporan Triwulan	Rp. 25.000.000
1	20	20	06		Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah Laporan Data Hasil Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Internal & Eksternal secara periodik	Kec. Tanete Riattang Barat	4 Laporan Triwulan	Rp. 108.715.000	DAU-APBD	Berdasarkan hasil pemantauan terhadap temuan/rekomendasi pemeriksaaan tahun sebelumnya	4 Laporan Triwulan	Rp. 160.000.000
1	20	20	09		Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Jumlah Kegiatan Gelar Pengawasan Tingkat Kabupaten	Kec. Tanete Riattang Barat	1 Kegiatan	Rp. 252.727.750	DAU-APBD	Kerjasama dengan BPK, BPKP, Itprov dan APH (Kejaksaaan dan Kepolisian)	1 Kegiatan	Rp. 285.000.000
1	20	20	14		Penanganan Laporan Gratifikasi, Whistle Blower System dan Benturan Kepentingan	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Laporan Gratifikasi, Whistle Blower System dan Benturan Kepentingan	Kec. Tanete Riattang Barat	2 Laporan Per Semester	Rp. 82.195.000	DAU-APBD	Sesuai kewenangan itda, termasuk sosialisasi didalamnya (Target 5 Kasus)	2 Laporan Per Semester	Rp. 95.000.000
1	20	21			Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase Jumlah Aparat Pengawas Inspektorat Daerah yang Bersertifikat keahlian sesuai kebutuhan hingga tahun berkenaan	Kec. Tanete Riattang Barat	70 %	Rp. 1.185.498.000	DAU-APBD	Program Prioritas/Strategis	80 %	Rp. 1.350.000.000
1	20	21	01		Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	Jumlah kegiatan diklat/bimtek pembentukan/ penjenjangan ahli dan pengembangan profesi yang diikuti oleh Aparat Pengawasan	Relatif (Disesuaikan dengan lokasi penyelenggaraan diklat/bimtek)	25 Kegiatan	Rp. 941.298.000	DAU-APBD	Disesuaikan dengan kebutuhan diklat/bimtek bagi peningkatan kompetensi SDM pengawasan	25 Kegiatan	Rp. 1.000.000.000



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2022	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	20	21	02		Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) terkait pengawasan internal	Kec. Tanete Riattang Barat	2 PKS	Rp. 244.200.000	DAU-APBD	Disesuaikan dengan kebutuhan jenis kompetensi yang dibutuhkan setiap aparat pengawasan	3 PKS	Rp. 350.000.000
1	20	22			Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase Jumlah Elemen Penilaian (Assessment) Peningkatan Kapabilitas APIP yang mencapai Level 3 hingga tahun berkenaan	Kec. Tanete Riattang Barat	100 % (6 dari 6 Elemen)	Rp. 46.530.000	DAU-APBD	Program Prioritas/Strategis	100 % (Penyempurnaan)	Rp. 50.000.000
1	20	22	02		Penyusunan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan	Jumlah Kegiatan Penyusunan Dokumen Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP menuju Level 3	Kec. Tanete Riattang Barat	1 Kegiatan	Rp. 46.530.000	DAU-APBD	Terdiri dari dokumen pelaporan rutin tahunan dan per triwulan	1 Kegiatan	Rp. 50.000.000
TOTAL PAGU INDIKATIF BELANJA LANGSUNG - PROGRAM DAN KEGIATAN									Rp. 9.756.812.571				Rp. 10.504.500.000
PAGU INDIKATIF BELANJA TIDAK LANGSUNG – GAJI, TUNJANGAN DAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS									Rp. 9.934.783.779				Rp. 10.000.000.000
TOTAL PAGU ANGGARAN INSPEKTORAT DAERAH									Rp. 19.691.596.350				Rp. 20.504.500.000

Dalam tabel 7 tersebut di atas, disajikan hal-hal yang menjadi catatan penting sebagai penjelasan atas sifat prioritas/strategisnya program/kegiatan serta penjelasan terkait rumusan indikator kinerja dan target capaian kinerja yang ditetapkan untuk Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kab. Bone pada Tahun 2021.

Rencana Kerja Tahun 2021 yang memuat program/kegiatan Inspektorat Daerah ini merupakan bagian dari RKPD Tahun 2021 yang penyusunannya dilakukan secara simultan, dengan memperhatikan :

- ✓ Keselarasan program dan kegiatan beserta target kinerja outcome dan output yang ingin dicapai;
- ✓ Kualitas rumusan indikator kinerja outcome dan output dari program dan kegiatan berorientasi pada hasil dan memenuhi kriteria indikator yang baik (SMART);
- ✓ Penetapan target kinerja tahunan dan pagu indikatif dari outcome/output program/kegiatan yang disesuaikan analisa kebutuhannya untuk pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, berdasarkan hasil kajian evaluasi kinerja tahun sebelumnya hingga tahun berjalan serta kajian terhadap isu-isu strategis yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Dalam rangka penerapan PMDN Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah guna pengintegrasian dan penyelarasan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang harus dilakukan dalam penganggaran APBD T.A. 2021, maka dilakukan pemetaan program dan kegiatan lama sesuai Renstra/Renja (menurut PMDN 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah) menjadi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan baru (sesuai Nomenklatur PMDN 90 Tahun 2019). Proses pemetaan dilakukan sesuai prinsip-prinsip pemetaan yang berlaku tanpa mengubah indikator-indikator dan target kinerja output dan outcome yang sudah ada dalam Renstra dan RPJMD. Hasil pemetaan ini secara lengkap beserta rencana penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2021 sesuai PMDN 90 Tahun 2019 dapat dilihat pada *Lampiran 1* dan *2*.



## **BAB V P E N U T U P**

Visi dan misi pemerintah daerah merupakan gambaran cita-cita luhur pembangunan daerah yang akan diwujudkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing serta berkeadilan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah, ditetapkanlah tujuan dan sasaran strategis yang harus dicapai. Tujuan dan sasaran strategis tersebut dijabarkan lebih lanjut oleh setiap perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

Olehnya itu, diperlukan perencanaan kinerja yang memuat langkah-langkah strategis yang sistematis, terukur, terencana dan berkesinambungan dari tahun ke tahun. Rencana kerja perangkat daerah merupakan salah satu dokumen perencanaan strategis yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah. Rencana kerja ini dimaksudkan agar perangkat daerah dapat merumuskan dan menyesuaikan langkah-langkah strategis dalam bentuk program dan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk masa 1 (satu) tahun kedepan sehingga proses pencapaian tujuan dan sasaran dapat diwujudkan dengan berorientasi pada hasil yang efektif, efisien dan ekonomis serta tercipta kesetaraan dalam pembangunan daerah.

Inspektorat Daerah Kab. Bone sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kab. Bone memiliki peran yang sangat penting untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pencapaian visi misi yang telah ditetapkan. Tugas dan fungsi yang dijalankan dalam bentuk pembinaan dan pengawasan internal atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kab. Bone, termasuk pemerintahan desa. Tugas dan fungsi tersebut menjadi prioritas utama dalam perencanaan kinerja setiap tahunnya dengan tujuan utama untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih yang ditandai dengan terwujudnya akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah beserta pelayanan publik yang baik bagi masyarakat dan bersih dari KKN.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2021 memuat 8 Program yang terdiri dari 31 Kegiatan. Program dan kegiatan tersebut terbagi atas 3 Program Prioritas dengan 10 Kegiatan dan 5 Program Pendukung dengan 21 Kegiatan yang kesemuanya difokuskan pada pencapaian target indikator kinerja dari 5 tujuan dan 8 sasaran strategis pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone.

Hal-hal penting yang perlu menjadi catatan dan perhatian Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya ke depan, yaitu sebagai berikut :



- ✓ Penguatan Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah harus menjadi sasaran utama dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal Inspektorat Daerah selaku APIP, khususnya yang terkait dengan :
  - Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dalam kerangka implementasi SAKIP;
  - Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah;
  - Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP;
  - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
  - Pencegahan dan Pemberantasan KKN; dan
  - Penguatan Kapabilitas APIP.
- ✓ Profesionalisme dalam hal kompetensi, etika, integritas Sumber Daya Aparatur Pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone harus ditingkatkan dan dikembangkan secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi, dan juga untuk merespon dinamika perubahan peraturan-perundang-undangan terkait pemerintahan daerah dan juga tuntutan masyarakat yang semakin kritis akan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintahan.
- ✓ Peran Inspektorat Kabupaten selaku APIP yang berperan sebagai Penjamin Mutu/Kualitas dan Fungsi Konsultatif (*quality assurance and partner consulting*) bagi OPD dan Pemerintah Desa, harus ditingkatkan kapabilitasnya ke Level 3 (Integrated) secara penuh dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, guna mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan & aset daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.
- ✓ Proses Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI dan APIP harus ditingkatkan secara intensif guna mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Kab. Bone, melalui koordinasi, monitoring dan evaluasi yang bersinergi dengan Tim Tindak Lanjut Kabupaten dan juga Pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kab. Bone.
- ✓ Penanganan terhadap pengaduan masyarakat sebagai salah satu bentuk pelayanan publik perlu ditingkatkan melalui pengembangan prosedur dan fasilitas yang memadai dalam kegiatan pelaksanaannya, khususnya pengaduan yang terkait dengan pengelolaan dana desa pada Pemerintahan Desa di Kab. Bone.
- ✓ Penganggaran untuk pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 ini perlu diupayakan peningkatan kualitasnya dengan prinsip "*money follow program*", berdasarkan hasil perencanaan kinerja program dan kegiatan yang benar-benar diarahkan pada pencapaian hasil yang lebih efektif, efisien, ekonomis serta relevan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dalam hal pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa. Termasuk strategi pelaksanaan program & kegiatan dalam mengantisipasi masih mewabahnya COVID-19.



Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi ketersediaan anggaran yang terbatas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah melalui penyesuaian target kinerja tahunan dan pagu anggaran program/kegiatan berdasarkan analisa kebutuhannya sesuai dengan hasil kajian evaluasi kinerja tahun sebelumnya hingga tahun berjalan serta kajian terhadap isu-isu strategis yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Dalam proses pelaksanaan Renja Tahun 2021 ini, beberapa kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diperlukan tindak lanjut pelaksanaannya untuk mendorong pencapaian target kinerja outcome/output dari program/kegiatan sesuai dengan target kinerja sasaran yang telah ditetapkan, antara lain sebagai berikut :

- ✓ Perencanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) kedepannya harus berbasis resiko dengan mempertimbangkan isu-isu strategis (termasuk antisipasi wabah COVID-19), kompetensi dan ketersediaan SDM serta anggaran yang ada, agar tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah tetap berjalan efektif dan efisien sesuai dengan arah dan kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur secara nasional oleh pemerintah pusat berdasarkan regulasi yang ada dan kewenangan pemerintah daerah;
- ✓ Penguatan peran Inspektorat Daerah Kab. Bone selaku penjamin mutu (*quality assurer*) dan pemberi jasa konsultatif (*consultative advisory*) bagi OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan juga pemerintahan desa, harus ditingkatkan guna mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan pemerintahan daerah dan desa.
- ✓ Penanganan pengaduan masyarakat dan kasus kepegawaian juga tetap harus diupayakan berjalan lebih baik sesuai dengan kewenangan Inspektorat Daerah seiring dengan peningkatan tuntutan masyarakat akan akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- ✓ Peningkatan Kapabilitas APIP menuju Level 3 (*integrated*) sesuai standar IACM (*Internal Audit Capability Model*) harus segera dioptimalkan, khususnya yang terkait dengan pemenuhan ketersediaan SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas/kompetensinya, infrastruktur pengawasan (Pedoman/SOP/Kendali Mutu, dsb.), dan juga sarana prasarana serta anggaran berdasarkan kebutuhan organisasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan yang semakin kompleks;
- ✓ Koordinasi dengan BPK, BPKP dan Inspektorat Provinsi Sul-Sel selaku mitra pengawasan, tetap harus dijaga dan ditingkatkan melalui konsultasi dan kerja sama pengawasan dalam peningkatan kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kab. Bone serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kab. Bone, khususnya yang terkait dengan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset pemerintah daerah maupun pemerintahan desa.





Demikian Rencana Kerja Tahun 2021 ini, yang diharapkan dapat menjadi pedoman kinerja yang memadai dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah terkait tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone kedepannya, guna mendorong terwujudnya tema pembangunan daerah pada tahun 2021, yaitu, ***”Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Sosial didukung Pembangunan Infrastruktur dan Kualitas SDM”***, sehingga tercipta, ***“Masyarakat Bone Yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”***, ditengah-tengah tantangan masih mewabahnya COVID-19 yang kedepannya semoga bisa segera dapat diatasi bersama oleh seluruh elemen masyarakat bangsa Indonesia dan seluruh dunia.



## **LAMPIRAN 1**

**Hasil Pemetaan Program dan Kegiatan  
Inspektorat Daerah Kab. Bone  
sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019**

HASIL PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019  
INSPEKTORAT DAERAH KAB. BONE

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	20			URUSAN WAJIB	PEMERINTAHAN UMUM								PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	PENGAWASAN	6	01				
1	20	01				NON PROGRAM														
1	20					Belanja Gaji dan Tunjangan beserta Tambahan Penghasilan PNS	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah realisasi pembayaran gaji dan tunjangan beserta tambahan penghasilan bulanan bagi ASN	ADMINISTRASI KEUANGAN	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran setiap tahun anggaran			6	01	01	2.02	01	
1	20	01				PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran setiap tahun anggaran								6	01				
1	20	01	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah paket pembayaran jasa komunikasi bulanan (telepon/faximile, internet, dan tv) sesuai rencana kebutuhan	ADMINISTRASI UMUM	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran setiap tahun anggaran			6	01	01	2.03	02	
1	20	01	07			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi/ Tenaga Teknis lainnya yang dibayarkan upah kerja beserta asuransinya untuk pelaksanaan administrasi perkantoran							6	01	01	2.03	07	
1	20	01	12			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan sesuai rencana kebutuhan							6	01	01	2.03	12	
1	20	01	15			Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan							6	01	01	2.03	15	
1	20	01	23			Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Dan Luar Daerah	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah keikutsertaan Aparat Inspektorat Daerah dalam kegiatan rutin pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah							6	01	01	2.03	18	
1	20	01	24			Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK), Barang Cetakan & Penggandaan, serta Makanan & Minuman sesuai rencana kebutuhan	Penyediaan Alat Tulis Kantor					Jumlah Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan			6	01	01	2.03	10
								Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan			6	01	01	2.03	11
								Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Paket Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Pegawai dan Tamu sesuai rencana kebutuhan			6	01	01	2.03	17				

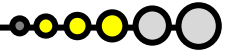
PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	20	02				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran								6	01			
1	20	02	05			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional sesuai rencana kebutuhan	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional sesuai rencana kebutuhan	ADMINISTRASI UMUM	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran		6	01	01	2.03	20
1	20	02	07			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan						6	01	01	2.03	22
1	20	02	09			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor sesuai rencana kebutuhan penganggaran	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor sesuai rencana kebutuhan penganggaran						6	01	01	2.03	24
1	20	02	10			Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan meubeleur sesuai rencana kebutuhan	Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan meubeleur kantor sesuai rencana kebutuhan						6	01	01	2.03	25
1	20	02	22			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah paket penyediaan peralatan/perlengkapan pemeliharaan kebersihan dan pekerjaan perbaikan gedung kantor sesuai rencana kebutuhan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah paket pekerjaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor sesuai rencana kebutuhan						6	01	01	2.03	28
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket penyediaan peralatan/perlengkapan rumah tangga untuk kebersihan kantor sesuai rencana kebutuhan							6	01	01	2.03	14
1	20	02	24			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan Dinas secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan Dinas secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan						6	01	01	2.03	30
1	20	02	26			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Paket Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Paket Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan						6	01	01	2.03	32
1	20	02	28			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Paket Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Paket Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan						6	01	01	2.03	34
1	20	02	29			Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur	Jumlah Paket Pemeliharaan Meubeleur Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur	Jumlah Paket Pemeliharaan Meubeleur Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan						6	01	01	2.03	35
1	20	03				PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Cakupan Realisasi Pengadaan Kebutuhan Penunjang Disiplin Aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran								6	01			
1	20	03	05			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu bagi Pegawai Inspektorat Daerah sesuai rencana kebutuhan	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu bagi Pegawai Inspektorat Daerah sesuai rencana kebutuhan	PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Jumlah Laporan Hasil Pengadaan Kebutuhan Penunjang Disiplin dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sesuai rencana kebutuhan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Realisasi Pengadaan Kebutuhan Penunjang Disiplin Aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran		6	01	01	2.04	05

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019										
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	20	06				PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN	Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan setiap tahun anggaran									6	01			
1	20	06	01			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja Inspektorat Daerah yang tersusun	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja Inspektorat Daerah yang tersusun	ADMINISTRASI KEUANGAN	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan setiap tahun anggaran			6	01	01	2.02	06
1	20	06	02			Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Inspektorat Daerah yang tersusun	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Inspektorat Daerah yang tersusun							6	01	01	2.02	04
1	20	08				PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum setiap tahun anggaran									6	01			
1	20	08	01			Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja dan Penganggaran Inspektorat Daerah yang tersusun	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Inspektorat Daerah yang tersusun	PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja dan Penganggaran Inspektorat Daerah yang tersusun	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum setiap tahun anggaran			6	01	01	2.01	01
								Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Penganggaran Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah yang tersusun							6	01	01	2.01	02
1	20	08	02			Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2. Jumlah Kegiatan Pengelolaan Website Perangkat Daerah	ADMINISTRASI KEUANGAN	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Inspektorat Daerah yang tersusun	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan setiap tahun anggaran			6	01	01	2.02	06
1	20	08	03			Promosi dan Pameran Pembangunan	Jumlah Kegiatan Promosi/Pameran Pembangunan yang diikuti		3. Jumlah Kegiatan Promosi/Pameran Pembangunan yang diikuti							6	01	01	2.02	06
1	20	21				PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	Persentase Jumlah Aparat Pengawas Inspektorat Daerah yang Bersertifikat keahlian sesuai kebutuhan hingga tahun berkenaan									6	01			
1	20	21	01			Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	Jumlah Kegiatan Diklat/Bimtek Pembentukan/Penjenjangan Ahli dan Pengembangan Profesi yang diikuti oleh Aparat Pengawasan	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Kegiatan Diklat/Bimtek Pembentukan/Penjenjangan Ahli dan Pengembangan Profesi yang diikuti oleh Aparat Pengawasan	PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Jumlah Laporan Hasil Pengadaan Kebutuhan Penunjang Disiplin dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sesuai rencana kebutuhan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Jumlah Aparatur Pengawas Inspektorat Daerah yang Bersertifikat keahlian sesuai kebutuhan hingga tahun berkenaan			6	01	01	2.04	09
1	20	21	02			Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) terkait pengawasan internal	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) terkait pengawasan internal							6	01	01	2.04	11



PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019											
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	20	20				PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	1. Persentase OPD dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja minimal B (>60-70) berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP 2. Persentase OPD yang bersih dari temuan berdasarkan hasil audit pengelolaan keuangan dan aset daerah oleh BPK-RI 3. Persentase penyelesaian tindak lanjut terhadap rekomendasi temuan hasil pemeriksaan (hingga tahun berkenaan) : 1. BPK-RI 2. APIP (BPKP, Itprov, Itkab) 4. Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Implementasi Reformasi Birokrasi 5. Persentase OPD yang menerapkan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi) 6. Jumlah OPD dan PemDes yang bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Dari Total 438 = 39 Badan/Dinas + 27 Kecamatan + 44 Kelurahan + 328 PemDes) 7. Persentase realisasi penanganan kasus pengaduan masyarakat yang diterima sesuai kewenangan Inspektorat Daerah pada tahun berkenaan 8. Persentase realisasi penanganan kasus kepegawaian sesuai kewenangan Inspektorat Daerah pada tahun berkenaan									6	01				
1	20	20	01			Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pengawasan Internal (Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, Monev dan Kegiatan Pengawasan Lainnya) berdasarkan PKPT	Audit Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Audit atas Kinerja dan Keuangan berdasarkan PKPT	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa berdasarkan PKPT	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1. Persentase OPD dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja minimal B (>60 - 70) berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP 2. Persentase OPD yang bersih dari temuan berdasarkan hasil audit pengelolaan keuangan dan aset daerah oleh BPK-RI 3. Persentase penyelesaian tindak lanjut terhadap rekomendasi temuan hasil pemeriksaan (hingga tahun berkenaan) : a. BPK-RI b. APIP (BPKP, Itda) 4. Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Implementasi Reformasi Birokrasi 5. Persentase OPD yang menerapkan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi)			6	01	02	2.01	01	
								Review Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Reviu atas Kinerja dan Keuangan berdasarkan PKPT					2. Persentase OPD yang bersih dari temuan berdasarkan hasil audit pengelolaan keuangan dan aset daerah oleh BPK-RI			6	01	02	2.01	02
								Pemantauan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pemantauan atas Kinerja dan Keuangan berdasarkan PKPT					3. Persentase penyelesaian tindak lanjut terhadap rekomendasi temuan hasil pemeriksaan (hingga tahun berkenaan) :			6	01	02	2.01	03
								Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Evaluasi atas Kinerja dan Keuangan berdasarkan PKPT					4. Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Implementasi Reformasi Birokrasi 5. Persentase OPD yang menerapkan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi)			6	01	02	2.01	04
								Asistensi dan Pendampingan	1. Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Kegiatan Pengawasan lainnya berdasarkan PKPT 2. Jumlah Laporan Inventarisasi Data Temuan Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal secara periodik	ASISTENSI DAN PENDAMPINGAN	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Kegiatan Asistensi dan Pendampingan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa	PROGRAM PERUMUSAN KEBUJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah OPD dan PemDes yang bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Dari Total 438 = 39 Badan/Dinas + 27 Kecamatan + 44 Kelurahan + 328 PemDes)			6	01	03	2.02	02	
1	20	20	05			Inventarisasi Temuan Pengawasan	Jumlah Laporan Inventarisasi Data Temuan Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal secara periodik														

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	20	20	06			Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah Laporan Data Hasil Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Internal & Eksternal secara periodik		3. Jumlah Laporan Data Hasil Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Internal & Eksternal secara periodik												
1	20	20	04			Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Kasus Kepegawaian sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	Audit Kinerja dan Keuangan	1. Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Kasus Kepegawaian sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6. Persentase realisasi penanganan kasus kepegawaian sesuai kewenangan Inspektorat Daerah pada tahun berkenaan			6	01	02	2.02	01	
1	20	20	14		Penanganan Laporan Gratifikasi, Whistle Blower System dan Benturan Kepentingan	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Laporan Gratifikasi, Whistle Blower System dan Benturan Kepentingan	2. Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Laporan Gratifikasi, Whistle Blower System dan Benturan Kepentingan		7. Persentase realisasi penanganan kasus pengaduan masyarakat yang diterima sesuai kewenangan Inspektorat Daerah pada tahun berkenaan												
1	20	20	02		Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Masyarakat sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	3. Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat sesuai kewenangan Inspektorat Daerah														
								Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar hasil Koordinasi Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat	ASISTENSI DAN PENDAMPINGAN	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Kegiatan Pengawasan lainnya atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah OPD dan PemDes yang bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Dari Total 438 = 39 Badan/Dinas + 27 Kecamatan + 44 Kelurahan + 328 PemDes)			6	01	03	2.02	01	
1	20	20	07			Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Jumlah Kegiatan Gelar Pengawasan Tingkat Kabupaten yang Terlaksana	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1. Jumlah Kegiatan Gelar Pengawasan Tingkat Kabupaten yang Terlaksana	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN	Laporan Hasil Penilaian Mandiri (Self Assessment) Peningkatan Kapabilitas APIP menuju Level 3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Jumlah Elemen Penilaian (Assessment) Peningkatan Kapabilitas APIP yang mencapai Level 3 hingga tahun berkenaan			6	01	03	2.01	01	
1	20	22			PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN	Persentase Jumlah Elemen Penilaian (Assessment) Peningkatan Kapabilitas APIP yang mencapai Level 3 hingga tahun berkenaan															
1	20	22	02		Penyusunan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan	Jumlah Kegiatan Penyusunan Dokumen Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP menuju Level 3	2. Jumlah Kegiatan Penyusunan Dokumen Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP menuju Level 3														



## **LAMPIRAN 2**

**Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan  
Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2021  
dan Prakiraan Maju Tahun 2022  
sesuai Hasil Pemetaan  
Berdasarkan PMDN Nomor 90 Tahun 2019**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH KAB. BONE TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022  
SESUAI HASIL PEMETAAN BERDASARKAN PMDN NOMOR 90 TAHUN 2019

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2022	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6					URUSAN PENGAWASAN								
6	01				PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
6	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum setiap tahun anggaran	Kec. Tanete Riattang Barat	100 %	Rp. 16.182.752.850	DAU-APBD	Program Penunjang untuk menunjang pelaksanaan program prioritas dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi	100 %	Rp. 16.724.500.000
						Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan setiap tahun anggaran		100 %				100 %	
						Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran setiap tahun anggaran		100 %				100 %	
						Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran		100 %				100 %	
						Cakupan Realisasi Pengadaan Kebutuhan Penunjang Disiplin Aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran		100 %				100 %	
						Persentase Jumlah Aparatur Pengawas Inspektorat Daerah yang Bersertifikat keahlian sesuai kebutuhan hingga tahun berkenaan		70 %				80 %	
6	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja dan Penganggaran Inspektorat Daerah yang tersusun	Kec. Tanete Riattang Barat	12 Dokumen	Rp. 49.223.000	DAU-APBD	Kegiatan Penunjang	12 Dokumen	Rp. 52.500.000
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Inspektorat Daerah yang tersusun	Kec. Tanete Riattang Barat	9 Dokumen : - PKPT - Renja - Perubahan Renja - Perubahan Renstra - Perjanjian Kinerja - Evaluasi Renja Per triwulan (4)	Rp. 36.226.750	DAU-APBD	Merupakan dokumen perencanaan kinerja rutin tahunan	9 Dokumen : - PKPT - Renja - Perubahan Renja - Perubahan Renstra - Perjanjian Kinerja - Evaluasi Renja Per triwulan (4)	Rp. 37.500.000
6	01	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Penganggaran Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah yang tersusun	Kec. Tanete Riattang Barat	3 Dokumen : - RKA-SKPD - DPA SKPD - DPPA-SKPD	Rp. 12.996.250	DAU-APBD	Merupakan dokumen penganggaran rutin tahunan	3 Dokumen : - RKA-SKPD - DPA SKPD - DPPA-SKPD	Rp. 15.000.000
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	4 Laporan Triwulan	Rp. 9.986.679.379	DAU-APBD	Kegiatan Penunjang	4 Laporan Triwulan	Rp. 10.055.000.000
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah realisasi pembayaran gaji dan tunjangan beserta tambahan penghasilan bulanan bagi ASN	Kec. Tanete Riattang Barat	12 Bulan	Rp. 9.934.783.779	DAU-APBD	Direncanakan dengan estimasi anggaran sesuai kondisi kepegawaian	12 Bulan	Rp. 10.000.000.000
6	01	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Inspektorat Daerah yang tersusun	Kec. Tanete Riattang Barat	25 Dokumen : - Lap. Keuangan Tahunan (1) - SPJ Keuangan Bulanan (12) - Laporan Realisasi Fisik & Keuangan Bulanan (12)	Rp. 9.223.000	DAU-APBD	Terdiri dari dokumen pelaporan keuangan rutin tahunan dan per triwulan	25 Dokumen : - Lap. Keuangan Tahunan (1) - SPJ Keuangan Bulanan (12) - Laporan Realisasi Fisik & Keuangan Bulanan (12)	Rp. 10.000.000

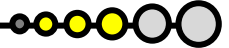
Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2022	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	01	01	2.02	06		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja Inspektorat Daerah yang tersusun	Kec. Tanete Riattang Barat	4 Dokumen : - Lap. Kinerja (LKj) - Data LPPD/LKPJ - Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Per semester (2)	Rp. 42.672.600	DAU-APBD	Terdiri dari dokumen pelaporan kinerja rutin tahunan & per bulan	4 Dokumen : - Lap. Kinerja (LKj) - Data LPPD/LKPJ - Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Per semester (2)	Rp. 45.000.000
							Jumlah Kegiatan Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	1 Kegiatan			Berupa updating dan maintenance website selama 1 tahun	1 Kegiatan	
							Jumlah Kegiatan Promosi/Pameran Pembangunan yang diikuti	Kec. Tanete Riattang Barat	1 Kegiatan			Berupa Publikasi Program Kegiatan Inspektorat dalam Pameran Pembangunan	1 Kegiatan	
6	01	01	2.03			<b>Administrasi Umum</b>	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	4 Laporan Triwulan	Rp. 4.911.712.471	DAU-APBD	Kegiatan Penunjang	4 Laporan Triwulan	Rp. 5.217.000.000
							Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah		4 Laporan Triwulan					
6	01	01	2.03	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah paket pembayaran jasa komunikasi bulanan (telepon/faximile, internet, dan tv) sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	36 Paket	Rp. 66.420.000	DAU-APBD	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan per bulan (3 Jenis)	36 Paket	Rp. 67.500.000
6	01	01	2.03	07		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi/ Tenaga Teknis lainnya yang dibayarkan upah kerja beserta asuransinya untuk pelaksanaan administrasi perkantoran	Kec. Tanete Riattang Barat	25 Orang	Rp. 227.590.000	DAU-APBD	Disertai pemberian asuransi ketenagakerjaan sebagai kewajiban pemerintah	25 Orang	Rp. 230.000.000
6	01	01	2.03	10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	12 Paket	Rp. 190.258.400	DAU-APBD	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan per bulan	12 Paket	Rp. 200.000.000
6	01	01	2.03	11		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	12 Paket	Rp. 43.186.250	DAU-APBD	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan per bulan	12 Paket	Rp. 45.000.000
6	01	01	2.03	12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah paket penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	4 Paket	Rp. 7.718.400	DAU-APBD	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan per triwulan	4 Paket	Rp. 8.000.000
6	01	01	2.03	14		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket penyediaan peralatan/perlengkapan rumah tangga untuk kebersihan kantor sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	4 Paket	Rp. 10.054.648	DAU-APBD	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan per triwulan	4 Paket	Rp. 12.500.000
6	01	01	2.03	15		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah paket penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	12 Paket	Rp. 43.500.000	DAU-APBD	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan per bulan	12 Paket	Rp. 45.000.000
6	01	01	2.03	17		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Paket Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Pegawai dan Tamu sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	12 Paket	Rp. 47.340.000	DAU-APBD	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan per bulan	12 Paket	Rp. 50.000.000
6	01	01	2.03	18		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah keikutsertaan Aparat Inspektorat Daerah dalam kegiatan rutin pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	50 Kegiatan	Rp. 706.752.000	DAU-APBD	Terdiri dari kegiatan rapat-rapat di tingkat Nasional dan Provinsi	50 Kegiatan	Rp. 725.000.000
6	01	01	2.03	20		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	6 Unit : - 6 Unit Mobil	Rp. 1.904.520.000	DAU-APBD	Disesuaikan dengan prioritas kebutuhan operasional pengawasan	6 Unit : - 4 Unit Mobil - 2 Unit Sepeda Motor	Rp. 2.000.000.000



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2022	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	9 Unit : - 2 Unit TV - 1 Paket Gorden - 1 Unit Vacuum Cleaner - 5 Unit AC	Rp. 131.783.564	DAU-APBD	Disesuaikan dengan prioritas kebutuhan perlengkapan gedung kantor yang belum lengkap	10 Unit/Set : - 1 Set Sound System - 4 Unit Loudspeaker Mobile - 1 Paket Karpet - 1 Unit Papan Nama Kantor - 1 Unit Papan Hibauan/Informasi - 2 Unit Dispenser	Rp. 150.000.000
6	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	79 Unit/Buah : - 3 Unit PC Desktop - 52 Unit Notebook - 3 Unit Printer - 4 Unit Scanner - 1 Unit Kamera - 6 Buah Alat Penghancur Kertas - 1 Unit Proyektor - 4 Buah Alat Ukur Jarak - 5 Bh Jaket Pelampung	Rp. 707.937.400	DAU-APBD	Disesuaikan dengan prioritas kebutuhan peralatan kantor yang masih kurang untuk pelayanan administrasi perkantoran dan operasional pengawasan	37 Unit : - 2 Unit PC Desktop - 10 Unit Notebook - 5 Unit Printer - 1 Unit Scanner - 4 Unit Proyektor Mini - 1 Paket CCTV (20 Titik) - 4 Unit Meter Dorong - 4 Unit Roll Meter - 4 Unit Jangka Sorong - 2 Unit Penunjuk Waktu	Rp. 500.000.000
6	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan meubeleur kantor sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	143 Buah/Set : - 69 Bh Meja Kerja - 69 Bh Kursi Kerja - 1 Set Kursi Sofa - 4 Bh Lemari Arsip	Rp. 448.061.809	DAU-APBD	Disesuaikan dengan prioritas kebutuhan meubeleur kantor yang belum lengkap dan penggantian yang rusak	131 Buah : - 20 Bh Meja Kerja - 1 Bh Meja Rapat - 20 Bh Kursi Kerja - 20 Bh Kursi Rapat - 3 Bh Kursi Tunggu - 5 Bh Lemari Arsip - 2 Bh Rak Buku - 60 Bh Filling Kabinet	Rp. 500.000.000
6	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah paket pekerjaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	1 Paket	Rp. 52.250.000	DAU-APBD	Berupa paket pekerjaan perbaikan gedung kantor sesuai kondisi ruangan	3 Paket	Rp. 350.000.000
6	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan Dinas secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	4 Paket	Rp. 268.840.000	DAU-APBD	Dianggarkan sebagai persediaan biaya pemeliharaan dan pembayaran pajak STNK tahunan sesuai estimasi kebutuhan pertriwulan	4 Paket	Rp. 275.000.000
6	01	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Paket Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	16 Paket	Rp. 21.100.000	DAU-APBD	Dianggarkan sebagai persediaan biaya pemeliharaan sesuai estimasi kebutuhan pertriwulan (4 Jenis)	16 Paket	Rp. 22.500.000
6	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Paket Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	8 Paket	Rp. 28.400.000	DAU-APBD	Dianggarkan sebagai persediaan biaya pemeliharaan sesuai estimasi kebutuhan pertriwulan (2 Jenis)	8 Paket	Rp. 30.000.000
6	01	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur	Jumlah Paket Pemeliharaan Meubeleur Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	4 Paket	Rp. 6.000.000	DAU-APBD	Dianggarkan sebagai persediaan biaya pemeliharaan sesuai estimasi kebutuhan pertriwulan	4 Paket	Rp. 6.500.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2022	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Laporan Hasil Pengadaan Kebutuhan Penunjang Disiplin dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	100 %	Rp. 1.235.138.000	DAU-APBD	Kegiatan Penunjang	100 %	Rp. 1.400.000.000
6	01	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu bagi Pegawai Inspektorat Daerah sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	1 Paket (1 Jenis)	Rp. 49.640.000	DAU-APBD	Paket pengadaan berdasarkan jenis pakaian yang dibutuhkan	1 Paket (1 Jenis)	Rp. 50.000.000
6	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah kegiatan diklat/bimtek pembentukan/ penjenjangan ahli dan pengembangan profesi yang diikuti oleh Aparat Pengawasan	Relatif (Disesuaikan dengan lokasi penyelenggaraan diklat/bimtek)	25 Kegiatan	Rp. 941.298.000	DAU-APBD	Disesuaikan dengan kebutuhan diklat/bimtek bagi peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM pengawasan	25 Kegiatan	Rp. 1.000.000.000
6	01	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) terkait pengawasan internal	Kec. Tanete Riattang Barat	2 PKS	Rp. 244.200.000	DAU-APBD	Disesuaikan dengan kebutuhan jenis kompetensi keahlian teknis yang dibutuhkan setiap aparat pengawasan	3 PKS	Rp. 350.000.000
6	01	02			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase OPD dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja minimal B (>60 - 70) berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	Kab. Bone	75 %	Rp. 2.948.909.750	DAU-APBD	Program Prioritas/Strategis	85 %	Rp. 3.175.000.000
						Persentase OPD yang bersih dari temuan berdasarkan hasil audit pengelolaan keuangan dan aset daerah oleh BPK-RI		95 %				100 %	
						Persentase penyelesaian tindak lanjut terhadap rekomendasi temuan hasil pemeriksaan (hingga tahun berkenaan) : 1. BPK-RI 2. APIP (BPKP, Itprov, Itkab)		- 90 % - 90 %				- 95 % - 95 %	
						Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Implementasi Reformasi Birokrasi		> 60 - 70				> 60 - 70	
						Persentase OPD yang menerapkan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi)		70 %				80 %	
						Persentase realisasi penanganan kasus pengaduan masyarakat yang diterima sesuai kewenangan Inspektorat Daerah pada tahun berkenaan		95 %				100 %	
						Persentase realisasi penanganan kasus kepegawaian sesuai kewenangan Inspektorat Daerah pada tahun berkenaan		95 %				100 %	
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa berdasarkan PKPT	Kec. Tanete Riattang Barat	4 Laporan Triwulan	Rp. 2.564.130.750	DAU-APBD	Kegiatan Prioritas	4 Laporan Triwulan	Rp. 2.775.000.000
6	01	02	2.01	01	Audit Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Audit atas Kinerja dan Keuangan berdasarkan PKPT	Sesuai Lokasi Obrik (Tersebar di 27 Kecamatan)	4 Laporan Triwulan	Rp. 1.314.852.500	DAU-APBD	Berdasarkan mandatory audit yang diatur oleh kebijakan pengawasan dari kemendagri dan isu-isu strategis daerah dengan berbasis resiko dan disesuaikan dengan ketersediaan SDM dan anggaran (dituangkan dalam PKPT)	4 Laporan Triwulan	Rp. 1.500.000.000
6	01	02	2.01	02	Review Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Reviu atas Kinerja dan Keuangan berdasarkan PKPT	Sesuai Lokasi Obrik (Tersebar di 27 Kecamatan)	4 Laporan Triwulan	Rp. 596.086.250	DAU-APBD		4 Laporan Triwulan	Rp. 600.000.000
6	01	02	2.01	03	Pemantauan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pemantauan atas Kinerja dan Keuangan berdasarkan PKPT	Sesuai Lokasi Obrik (Tersebar di 27 Kecamatan)	4 Laporan Triwulan	Rp. 493.194.500	DAU-APBD		4 Laporan Triwulan	Rp. 500.000.000
6	01	02	2.01	04	Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Evaluasi atas Kinerja dan Keuangan berdasarkan PKPT	Sesuai Lokasi Obrik (Tersebar di 27 Kecamatan)	4 Laporan Triwulan	Rp. 159.997.500	DAU-APBD		4 Laporan Triwulan	Rp. 175.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2022	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kec. Tanete Riattang Barat	4 Laporan Triwulan	Rp. 384.779.000	DAU-APBD	Kegiatan Prioritas	4 Laporan Triwulan	Rp. 400.000.000
6	01	02	2.02	01	Audit Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Kasus Kepegawaian sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	Dalam Wilayah Kab. Bone (d disesuaikan dengan kondisi kasus)	4 Laporan Triwulan	Rp. 384.779.000	DAU-APBD	untuk penanganan kasus kepegawaian (Target 24 Kasus)	4 Laporan Triwulan	Rp. 400.000.000
					Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Laporan Gratifikasi, Whistle Blower System dan Benturan Kepentingan			4 Laporan Triwulan			untuk penanganan Laporan Gratifikasi, WBS & BK (Target 5 Kasus)	4 Laporan Triwulan	
					Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat sesuai kewenangan Inspektorat Daerah			4 Laporan Triwulan			untuk penanganan kasus pengaduan masyarakat (Target 20 Kasus)	4 Laporan Triwulan	
6	01	03			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Jumlah Elemen Penilaian (Assessment) Peningkatan Kapabilitas APIP yang mencapai Level 3 hingga tahun berkenaan	Kec. Tanete Riattang Barat	100 % (6 dari 6 Elemen)	Rp. 559.933.750	DAU-APBD	Program Prioritas/Strategis	100 % (Penyempurnaan)	Rp. 605.000.000
					Jumlah OPD dan PemDes yang bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Dari Total 438 = 39 Badan/Dinas + 27 Kecamatan + 44 Kelurahan + 328 PemDes)			425 OPD+PemDes				430 OPD+PemDes	
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Laporan Hasil Penilaian Mandiri (Self Assessment) Peningkatan Kapabilitas APIP menuju Level 3	Kec. Tanete Riattang Barat	1 Laporan	Rp. 220.757.750	DAU-APBD	Kegiatan Prioritas	1 Laporan	Rp. 225.000.000
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Kegiatan Gelar Pengawasan Tingkat Kabupaten yang Terlaksana	Kec. Tanete Riattang Barat	1 Kegiatan	Rp. 220.757.750	DAU-APBD	Kerjasama dengan BPK, BPKP, Itprov dan Aparat Penegak Hukum (APH)	1 Kegiatan	Rp. 225.000.000
					Jumlah Kegiatan Penyusunan Dokumen Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP menuju Level 3			1 Kegiatan				1 Kegiatan	
6	01	03	2.02		Asistensi dan Pendampingan	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Kegiatan Asistensi dan Pendampingan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa	Kec. Tanete Riattang Barat	4 Laporan Triwulan	Rp. 339.176.000	DAU-APBD	Kegiatan Prioritas	4 Laporan Triwulan	Rp. 380.000.000
6	01	03	2.02	01	Tindak lanjut Pengaduan Masyarakat	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar hasil Koordinasi Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat	Kec. Tanete Riattang Barat	4 Laporan Triwulan	Rp. 76.632.000	DAU-APBD	Merupakan kegiatan koordinasi bersama dengan APH dalam proses tindak lanjut penanganan Pengaduan Masyarakat	4 Laporan Triwulan	Rp. 80.000.000
6	01	03	2.02	01	Asistensi dan Pendampingan	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Kegiatan Pengawasan lainnya berdasarkan PKPT	Kec. Tanete Riattang Barat	4 Laporan Triwulan	Rp. 262.544.000	DAU-APBD	Berupa pemberian jasa konsultasi (asistensi dan pendampingan) bagi OPD dan PemDes, berdasarkan inventarisasi dan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan APIP maupun BPK-RI, agar tidak menjadi temuan berulang dalam penyelenggaraan pemerintahan di masing-masing OPD & PemDes	4 Laporan Triwulan	Rp. 300.000.000
					Jumlah Laporan Inventarisasi Data Temuan Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal secara periodik			4 Laporan Triwulan				4 Laporan Triwulan	
					Jumlah Laporan Data Hasil Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Internal & Eksternal secara periodik			4 Laporan Triwulan				4 Laporan Triwulan	
TOTAL PAGU INDIKATIF									Rp. 19.691.596.350				Rp. 20.504.500.000



### **LAMPIRAN 3**

**Pemutakhiran Hasil Pemetaan Rencana Program,  
Kegiatan, dan Sub Kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Bone  
Tahun 2021  
Berdasarkan Pemutakhiran PMDN Nomor 90 Tahun 2019**

**PEMUTAKHIRAN PEMETAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PMDN 90/2019  
RENJA INSPEKTORAT DAERAH KAB. BONE TAHUN 2021**

PROGRAM KEGIATAN SEBELUM PEMUTAKHIRAN 10 SEPTEMBER 2020					PROGRAM KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN 10 SEPTEMBER 2020				
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN
6.01	INSPEKTORAT DAERAH			Rp 19.691.596.350	6.01	INSPEKTORAT DAERAH			Rp 19.691.596.350
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1. Persentase OPD dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja minimal B (>60-70) berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	75%	Rp 2.948.909.750	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1. Persentase OPD dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja minimal B (>60-70) berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	75%	Rp 2.992.903.500
		2. Persentase OPD yang bersih dari temuan berdasarkan hasil audit pengelolaan keuangan dan aset daerah oleh BPK-RI	95%				2. Persentase OPD yang bersih dari temuan berdasarkan hasil audit pengelolaan keuangan dan aset daerah oleh BPK-RI	95%	
		3. Persentase penyelesaian tindak lanjut terhadap rekomendasi temuan hasil pemeriksaan (hingga tahun berkenaan) : > BPK-RI > APIP (BPKP, Itprov, Itkab)	90% 90%				3. Persentase penyelesaian tindak lanjut terhadap rekomendasi temuan hasil pemeriksaan (hingga tahun berkenaan) : > BPK-RI > APIP (BPKP, Itprov, Itkab)	90% 90%	
		4. Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Implementasi Reformasi Birokrasi	>60-70				4. Persentase OPD yang menerapkan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi)	70%	
		5. Persentase OPD yang menerapkan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi)	70%				5. Persentase realisasi penanganan kasus pengaduan masyarakat yang diterima sesuai kewenangan Inspektorat Daerah pada tahun berkenaan	95%	
		6. Persentase realisasi penanganan kasus pengaduan masyarakat yang diterima sesuai kewenangan Inspektorat Daerah pada tahun berkenaan	95%				6. Persentase realisasi penanganan kasus kepegawaian sesuai kewenangan Inspektorat Daerah pada tahun berkenaan	95%	
		7. Persentase realisasi penanganan kasus kepegawaian sesuai kewenangan Inspektorat Daerah pada tahun berkenaan	95%						
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa berdasarkan PKPT	4 Laporan (Triwulan)	Rp 2.564.130.750	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa berdasarkan PKPT	4 Laporan (Triwulan)	Rp 2.608.124.500
6.01.02.2.01.01	Audit Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Audit atas Kinerja dan Keuangan berdasarkan PKPT	4 Laporan (Triwulan)	Rp 1.314.852.500	6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemda berdasarkan PKPT	392 Laporan	Rp 1.160.327.500
6.01.02.2.01.02	Review Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Reviu atas Kinerja dan Keuangan berdasarkan PKPT	4 Laporan (Triwulan)	Rp 596.086.250	6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemda berdasarkan PKPT	191 Laporan	Rp 704.611.000
6.01.02.2.01.03	Pemantauan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pemantauan atas Kinerja dan Keuangan berdasarkan PKPT	4 Laporan (Triwulan)	Rp 493.194.500	6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Pemda berdasarkan PKPT	2 Laporan	Rp 25.317.500
6.01.02.2.01.04	Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Evaluasi atas Kinerja dan Keuangan berdasarkan PKPT	4 Laporan (Triwulan)	Rp 159.997.500	6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Pemda berdasarkan PKPT	1 Laporan	Rp 12.658.750
					6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan PKPT	144 Laporan	Rp 448.502.000
					6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kegiatan Gelar Pengawasan Tingkat Kabupaten yang Terlaksana	1 Kegiatan	Rp 127.727.750
					6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Inventarisasi Data Temuan beserta Movev Tindak Lanjut Penyelesaian Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal secara periodik	4 Laporan (Triwulan)	Rp 128.980.000
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	4 Laporan (Triwulan)	Rp 384.779.000	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	4 Laporan (Triwulan)	Rp 384.779.000
6.01.02.2.02.01	Audit Kinerja dan Keuangan	1. Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Kasus Kepegawaian sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	4 Laporan (Triwulan)	Rp 384.779.000	6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1. Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Kasus Kepegawaian sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	4 Laporan (Triwulan)	Rp 384.779.000
		2. Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Laporan Gratifikasi, Whistle Blower System dan Benturan Kepentingan	2 Laporan (Semester)				2. Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Laporan Gratifikasi, Whistle Blower System dan Benturan Kepentingan	2 Laporan (Semester)	
		3. Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	4 Laporan (Triwulan)				3. Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	4 Laporan (Triwulan)	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1. Persentase Jumlah Elemen Penilaian (Assessment) Peningkatan Kapabilitas APIP yang mencapai Level 3 hingga tahun berkenaan	100% (6 Dari 6 Elemen)	Rp 559.933.750	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1. Persentase Jumlah Elemen Penilaian (Assessment) Peningkatan Kapabilitas APIP yang mencapai Level 3 hingga tahun berkenaan	100% (6 Dari 6 Elemen)	Rp 458.820.000
		2. Jumlah OPD dan PemDes yang bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Dari Total 438 = 39 Badan/Dinas + 27 Kecamatan + 44 Kelurahan + 328 PemDes)	425 OPD/PemDes				2. Jumlah OPD dan PemDes yang bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Dari Total 438 = 39 Badan/Dinas + 27 Kecamatan + 44 Kelurahan + 328 PemDes)	425 OPD/PemDes	
							3. Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Implementasi Reformasi Birokrasi	>60-70	

PROGRAM KEGIATAN SEBELUM PEMUTAKHIRAN 10 SEPTEMBER 2020					PROGRAM KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN 10 SEPTEMBER 2020				
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Laporan Hasil Penilaian Mandiri (Self Assessment) Peningkatan Kapabilitas APIP menuju Level 3	1 Laporan	Rp 220.757.750	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Laporan Hasil Penilaian Mandiri (Self Assessment) Peningkatan Kapabilitas APIP menuju Level 3	1 Laporan	Rp 93.030.000
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1. Jumlah Kegiatan Gelar Pengawasan Tingkat Kabupaten yang Terlaksana 2. Jumlah Kegiatan Penyusunan Dokumen Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP menuju Level 3	1 Kegiatan 1 Kegiatan	Rp 220.757.750	6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Kegiatan Penyusunan Dokumen Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP menuju Level 3	1 Kegiatan	Rp 93.030.000
6.01.03.2.02	Asistensi dan Pendampingan	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Kegiatan Asistensi dan Pendampingan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa	4 Laporan (Triwulan)	Rp 339.176.000	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Asistensi dan Pendampingan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa	4 Laporan (Triwulan)	Rp 365.790.000
6.01.03.2.02.01	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar hasil Koordinasi Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat	4 Laporan (Triwulan)	Rp 76.632.000	6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	7 Laporan	Rp 115.333.500
6.01.03.2.02.02	Asistensi dan Pendampingan	1. Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Kegiatan Pengawasan lainnya berdasarkan PKPT 2. Jumlah Laporan Inventarisasi Data Temuan Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal secara periodik 3. Jumlah Laporan Data Hasil Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Internal & Eksternal secara periodik	4 Laporan (Triwulan) 4 Laporan (Triwulan) 4 Laporan (Triwulan)	Rp 262.544.000	6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi Penyelenggaraan Urusan Pemda dan Pemdes berdasarkan PKPT	8 Laporan	Rp 45.994.000
					6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi berdasarkan PKPT	2 Laporan	Rp 26.761.000
					6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas berdasarkan PKPT	3 Laporan	Rp 177.701.500
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum setiap tahun anggaran 2. Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan setiap tahun anggaran 3. Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran setiap tahun anggaran 4. Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran 5. Cakupan Realisasi Pengadaan Kebutuhan Penunjang Disiplin Aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran 6. Persentase Ketersediaan Aparatur Pengawasan Inspektorat Daerah yang Bersertifikat keahlian sesuai kebutuhan hingga tahun berkenaan	100% 100% 100% 100% 100% 70%	Rp 16.182.752.850	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum setiap tahun anggaran 2. Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi & Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan setiap tahun anggaran 3. Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran setiap tahun anggaran 4. Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran 5. Cakupan Realisasi Pengadaan Kebutuhan Penunjang Disiplin Aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran 6. Persentase Ketersediaan Aparatur Pengawasan Inspektorat Daerah yang Bersertifikat keahlian sesuai kebutuhan hingga tahun berkenaan	100% 100% 100% 100% 100% 70%	Rp 16.239.872.850
6.01.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja dan Penganggaran Inspektorat Daerah yang tersusun	12 Dokumen	Rp 49.223.000	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Inspektorat Daerah yang tersusun	16 Dokumen	Rp 66.245.600
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Inspektorat Daerah yang tersusun	9 Dokumen	Rp 36.226.750	6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Inspektorat Daerah yang tersusun	5 Dokumen	Rp 35.301.750
6.01.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Penganggaran Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah yang tersusun	3 Dokumen	Rp 12.996.250	6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Inspektorat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	Rp 2.190.000
					6.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Inspektorat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	Rp 1.918.750
					6.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Inspektorat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	Rp 1.687.500
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 Laporan (Triwulan)	Rp 9.986.679.379					
6.01.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja Inspektorat Daerah yang tersusun 2. Jumlah Kegiatan Promosi/Pameran Pembangunan yang diikuti	4 Dokumen 1 Kegiatan	Rp 42.672.600	6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Jumlah Dokumen Evaluasi & Pelaporan Capaian Kinerja Inspektorat Daerah yang tersusun 2. Jumlah Kegiatan Promosi/Pameran Pembangunan yang diikuti	8 Dokumen 1 Kegiatan	Rp 25.147.600
		3. Jumlah Kegiatan Pengelolaan Website Perangkat Daerah	1 Kegiatan		6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Laporan (Triwulan)	Rp 18.600.000
					6.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Website Perangkat Daerah	1 Kegiatan	Rp 18.600.000
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan beserta Tambahan Penghasilan Bulanan bagi ASN	12 Bulan	Rp 9.934.783.779	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 Laporan (Triwulan)	Rp 9.944.006.779
6.01.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Inspektorat Daerah yang tersusun	25 Dokumen	Rp 9.223.000	6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan beserta Tambahan Penghasilan Bulanan bagi ASN	12 Bulan	Rp 9.934.783.779
					6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Tahunan Inspektorat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	Rp 925.000
					6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Periodik Inspektorat Daerah yang tersusun	24 Dokumen	Rp 8.298.000



PROGRAM KEGIATAN SEBELUM PEMUTAKHIRAN 10 SEPTEMBER 2020					PROGRAM KEGIATAN SETELAH PEMUTAKHIRAN 10 SEPTEMBER 2020				
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN
6.01.01.2.03	Administrasi Umum	1. Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Laporan (Triwulan)	Rp 4.911.712.471	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Perangkat Daerah	4 Laporan (Triwulan)	Rp 294.010.000
		2. Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah	4 Laporan (Triwulan)						
6.01.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Paket Pembayaran Jasa Komunikasi Bulanan (telepon/faximile, internet, dan tv) sesuai rencana kebutuhan	36 Paket	Rp 66.420.000	6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Paket Pembayaran Jasa Komunikasi Bulanan (telepon/faximile, internet, dan tv) sesuai rencana kebutuhan	36 Paket	Rp 66.420.000
6.01.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi/Tenaga Teknis lainnya yang dibayarkan upah kerja beserta asuransinya untuk pelaksanaan administrasi perkantoran	25 orang	Rp 227.590.000	6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum yang dibayarkan perbulan untuk pelaksanaan administrasi perkantoran	25 Orang	Rp 227.590.000
6.01.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	12 Paket	Rp 190.258.400	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Laporan (Triwulan)	Rp 1.112.979.698
					6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	12 Paket	Rp 190.258.400
6.01.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	12 Paket	Rp 43.186.250	6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	12 Paket	Rp 43.186.250
6.01.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan sesuai rencana kebutuhan	4 Paket	Rp 7.718.400	6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan sesuai rencana kebutuhan	4 Paket	Rp 7.718.400
6.01.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan/Perlengkapan Rumah Tangga untuk Kebersihan Kantor sesuai rencana kebutuhan	4 Paket	Rp 10.054.648	6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan/Perlengkapan Rumah Tangga untuk Kebersihan Kantor sesuai rencana kebutuhan	4 Paket	Rp 10.054.648
6.01.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan	12 Paket	Rp 43.500.000	6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan	12 Paket	Rp 43.500.000
6.01.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Paket Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Pegawai dan Tamu sesuai rencana kebutuhan	12 Paket	Rp 47.340.000	6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Pegawai dan Tamu sesuai rencana kebutuhan	12 Paket	Rp 47.340.000
6.01.01.2.03.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah keikutsertaan Aparat Inspektorat Daerah dalam kegiatan rutin pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	50 Kegiatan	Rp 706.752.000	6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah keikutsertaan Aparat Inspektorat Daerah dalam kegiatan rutin pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	50 Kegiatan	Rp 770.922.000
6.01.01.2.03.20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional sesuai rencana kebutuhan	6 Unit	Rp 1.904.520.000	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	4 Laporan (Triwulan)	Rp 3.192.302.773
					6.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional sesuai rencana kebutuhan	6 Unit	Rp 1.904.520.000
6.01.01.2.03.22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	9 Unit	Rp 131.783.564	6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	88 Unit/Set	Rp 839.720.964
6.01.01.2.03.24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	79 Unit/Set	Rp 707.937.400					
6.01.01.2.03.25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Meubeleur Kantor sesuai rencana kebutuhan	143 Buah/Set	Rp 448.061.809	6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubeleur Kantor sesuai rencana kebutuhan	143 Buah/Set	Rp 448.061.809
6.01.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah paket pekerjaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor sesuai rencana kebutuhan	1 Paket	Rp 52.250.000	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	4 Laporan (Triwulan)	Rp 376.590.000
					6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pekerjaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor sesuai rencana kebutuhan	1 Paket	Rp 52.250.000
6.01.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan Dinas secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	4 Paket	Rp 268.840.000	6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan Dinas secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	4 Paket	Rp 268.840.000
6.01.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Paket Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	16 Paket	Rp 21.100.000	6.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan Sarana/Prasarana Kelengkapan Pendukung Gedung Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	3 Paket	Rp 15.000.000
6.01.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Paket Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	8 Paket	Rp 28.400.000	6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	12 Paket	Rp 34.500.000
6.01.01.2.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Paket Pemeliharaan Meubeleur Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	4 Paket	Rp 6.000.000	6.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Paket Pemeliharaan Meubeleur Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	4 Paket	Rp 6.000.000
6.01.01.2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Laporan Hasil Pengadaan Kebutuhan Penunjang Disiplin dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sesuai rencana kebutuhan	5 Laporan	Rp 1.235.138.000	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengadaan Kebutuhan Penunjang Disiplin dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	5 Laporan	Rp 1.235.138.000
6.01.01.2.04.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu bagi Pegawai Inspektorat Daerah sesuai rencana kebutuhan	1 Paket	Rp 49.640.000	6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas bagi Pegawai Inspektorat Daerah sesuai rencana kebutuhan	1 Paket	Rp 49.640.000
6.01.01.2.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Kegiatan Diklat/Bimtek Pembentukan/Penjenjangan Ahli dan Pengembangan Profesi yang diikuti oleh Aparat Pengawasan	25 Kegiatan	Rp 941.298.000	6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Kegiatan Diklat/Bimtek Pembentukan/Penjenjangan Ahli dan Pengembangan Profesi yang diikuti oleh Aparat Pengawasan	25 Kegiatan	Rp 941.298.000
6.01.01.2.04.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) terkait pengawasan internal	2 PKS	Rp 244.200.000	6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) terkait Pengawasan Internal	2 PKS	Rp 244.200.000